

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Kotapinang, Januari 2026

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmatnya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan periode 2025-2029 dapat tersusun, sesuai dengan waktunya.

Renstra ini disusun untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai sesuai tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang memfokuskan pada optimalisasi kinerja Institusi menuju good governance. Secara Konsisten diharapkan pelaksanaan Pemerintah lebih berhasil guna dan berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparansi terhadap pelayanan publik.

Renstra bertujuan untuk menterjemahkan Visi dan Misi Kepala Daerah kedalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama tahun 2025-2029, yang disertai dengan program prioritas Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Adapun pedoman yang dipakai adalah RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029. Renstra ini berisi perumusan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam bentuk program dan kegiatan beserta kerangka pendanaanya selama tahun 2025-2029.

Renstra ini terdiri dari Pendahuluan, Gambaran Pelayanan, Isi-isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Dengan disusunnya Rancangan Awal Renstra ini dapat digunakan sebagai acuan bagi peningkatan kualitas kinerja, mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta mencari solusi terbaik guna menjawab dinamika dan perkembangan keuangan baik target dan realisasinya.

Semoga Renstra ini dapat bermanfaat sebagai pijakan dalam pelaksanaan tugas membangun daerah yang lebih maju sesuai dengan visi kabupaten Labuhanbatu Selatan “**Labuhanbatu Selatan yang Semakin Modern**”.

Kotapinang, 26 Januari 2026

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**



IMRON ROSADI SIREGAR, S.Pd., M.M.
PEMBINA Tk. I (IV/b)
NIP. 197311110 199903 1 004.

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Lampiran	
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	6
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	6
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	5
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	15
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.2 Permasalahan Dan isu Strategis Perangkat Daerah	24
2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.2.2 Telaahan VISI, MISI, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	26
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	47
3.1 Tujuan	47
3.2 Sasaran	48
3.3 Strategi	51
3.4 Arah Kebijakan	57
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN	60
4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	60
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	91
BAB V. PENUTUP	94

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam system Perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah Bersama pemangku kepentingan berdasarkan peran kewenangannya berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari system perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional, dan berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah.

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan melaksanakan fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut maka Badan Keuangan dan Aset Daerah perlu membuat dokumen perencanaan yang terstruktur dan terukur dalam batas waktu tertentu seperti Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah untuk dokumen perencanaan satu tahun dan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah untuk dokumen perencanaan lima tahun. Semua dokumen tersebut harus merujuk pada dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat visi dan misi Kepala Daerah dalam masa kepemimpinannya yaitu RPJMD. Dengan demikian RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Organisasi Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian tujuan organisasi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra Organisasi Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra merupakan komitmen Badan Keuangan dan Aset Daerah yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yaitu **“Labuhanbatu Selatan yang Semakin Modern”**.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kesetaraan Gender;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

- 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah;
 20. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025 – 2029;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah SIPD;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
 28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 – 2045;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017- 2037;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025–2029 adalah sebagai dokumen perencanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan mengacu pada RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029. Dengan demikian Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2025-2029 disusun dengan maksud menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah serta sebagai pedoman bagi BKAD Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun mendatang melalui pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah:

1. Mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi BKAD untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
3. Untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan PPAS demi lancarnya pelaksanaan program yang ditetapkan dalam KUA, RKPD, RENJA BKAD Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
4. Sebagai tolak ukur evaluasi kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- **Bab I Pendahuluan** terdiri atas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra BKAD dan sistematika penulisan;
- **Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**
 1. memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Organisasi Perangkat Daerah(OPD) dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra OPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD;

2. memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), telaahan visi, misi dan program KDH terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan terhadap RTRW dan penentuan isu-isu strategis;
- **Bab III Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**
 1. terdiri atas Uraian Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Tujuan merupakan penjabaran visi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai.
 2. Strategi yaitu cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program kegiatan, Kebijakan yaitu Arah yang diambil oleh OPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kejadian untuk mencapai tujuan.
 - **Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Bab VII Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan**
 1. memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif;
 2. memuat indikator kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
 - **Bab V Penutup**

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kedudukan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, untuk selanjutnya disingkat (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan dengan adanya situasi Perubahan Nomenklatur sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 6 Desember 2016 dan mulai efektif berjalan terhitung 8 April 2022 maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Labuhanbatu Selatan berubah menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah atau disingkat (BKAD) merupakan Badan Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki Kebijakan sebagai berikut, **“Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dan kewenangan otonomi daerah di bidang pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan”**.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam proses pelaksanaan tugas BKAD Kab. Labuhanbatu Selatan diharapkan terjadi kondisi sebagai berikut :

1. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergisitas antar SKPD dan Instansi serta Stakeholders lainnya dalam urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdiri dari :

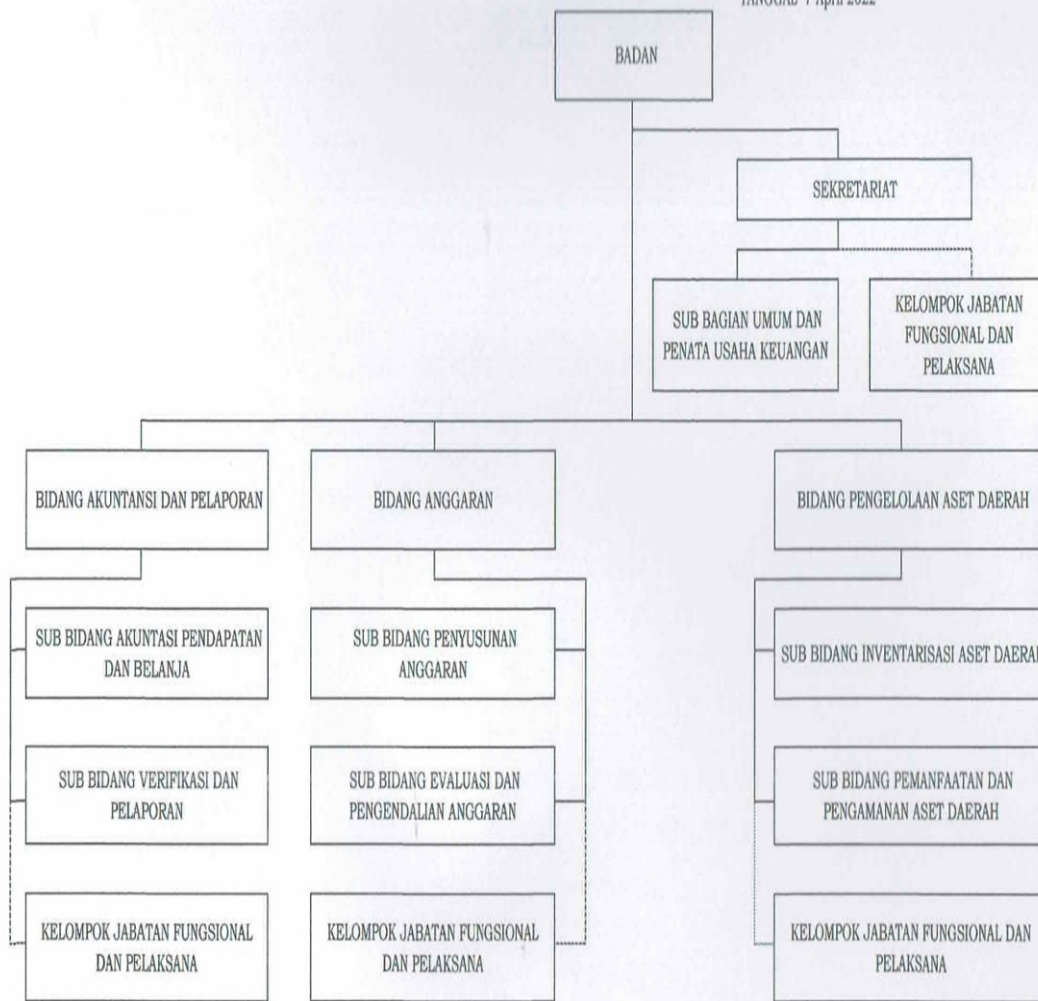
- A. Badan;
- B. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Penatausaha Keuangan
- C. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja.
 2. Sub Bidang Verifikasi dan Pelaporan;
- D. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran;
- E. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah;
 2. Sub Bidang Inventarisasi Aset Daerah
- F. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja BKAD Kabupaten Labuhanbatu Selatan di bawah ini :

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI BKAD

BAGAN ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

LAMPIRAN XXIII PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TANGGAL 7 April 2022



BUPATI LABUHANBATU SELATAN

ttd,

H. EDIMIN

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dirincikan sebagai berikut :

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TUGAS POKOK

Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah dan kewenangan otonomi daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

FUNGSI

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Mengkoordinasikan penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
3. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
4. Penyusunan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
5. Merumuskan penetapan Perda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD dan PAPBD;
6. Merumuskan penetapan kebijakan sisdur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Merumuskan kebijakan operasional pengelolaan keuangan daerah sebagai pedoman pelaksanaan APBD;
8. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
9. Melaksanakan pengesahan DPA – SKPD dan DPPA – SKPD ;
10. Menyelenggarakan pembinaan pengelolaan keuangan dan barang daerah ;
11. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi tentang Pengelolaan Investasi, Aset daerah, BUMD, pinjaman dan obligasi daerah serta BLU Kabupaten;
12. Merumuskan perhitungan alokasi DAU dan realisasi Dana Bagi Hasil serta usulan program untuk didanai dari DAK;
13. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

SEKRETARIAT

TUGAS POKOK

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian pelayanan secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bagian umum, kepegawaian, keuangan, program serta pelaporan aset dilingkungan badan.

FUNGSI

1. Penyusunan rencana kegiatan badan;
2. Penyelenggaraan administrasi umum di lingkungan badan;
3. Pelaksanaan serta menyusun pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi umum;
4. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum;
5. Penyelenggaraan urusan rumah tangga badan; dan
6. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan atasan;

URAIAN TUGAS

1. Merencanakan Kebijakan operasional sekretariat berdasarkan kebijakan umum, rencana strategis dan rencana kerja badan sebagai pedoman kerja;
2. Melakukan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan;
3. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan tentang program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan untuk penunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di sekretariat sesuai rencana yang ditetapkan;
5. Mengarahkan disposisi dan perintah lisan/tertulis pimpinan kepada bidang bersangkutan sesuai tugas pokoknya;
6. Mengkoordinasikan penyiapan bahan materi dan penyusun rencana strategis (Renstra) SKPD, rencana kerja (Renja), KUA-PPAS, RKA-SKPD, DPA-SKPD, RKAP-SKPD, DPPA-SKPD, laporan kinerja bulanan, triwulan dan tahunan serta LKPJ dan LPPD berdasarkan bahan dan materi sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku;
7. Mengkoordinasikan dan meneliti kelengkapan SPP- LS, SPP- UP, SPP-GU, SPP- TU, SPP-LS gaji dan tunjangan/tambahan penghasilan serta verifikasi SPP sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Mengkoordinasikan dan mengelola surat menyurat dan kearsipan, pengadaan dan pendistribusian alat tulis kantor (ATK), barang perlengkapan dan peralatan kantor serta pengadaan bahan pustaka;
9. Mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan usulan penghapusan barang inventaris, pengguna sarana dan fasilitas kantor, pengaturan perjalanan dinas, pemeliharaan kebersihan, perawatan dan pengamanan kantor serta lingkungannya;
10. Mengkoordinasikan penyiapan penyelenggara upacara, apel, acara keagamaan dan kegiatan kantor lainnya serta rapat badan, rapat badan dengan instansi pemerintah maupun dengan swasta dan penerima tamu;
11. Mengkoordinasikan pelaksanaan dokumentasi yang berkaitan dengan kebijakan dan kegiatan instansi terkait, mendokumentasikan berita dan penyelenggara hubungan masyarakat serta pendokumentasikan produk hukum kepegawaian;
12. Menyelia penyelesaian administrasi pegawai meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, bazetting, DUK, SKP dan administrasi kepegawaian lainnya;

13. Menilai bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
14. Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan sekretariat kepada kepala badan secara lisan maupun tulisan; dan
15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

SUB BAGIAN UMUM DAN PENATA USAHA KEUANGAN

TUGAS POKOK

Sub Bagian Umum dan Penata Usaha Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris di bidang Umum, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga serta penatausahaan pengelolaan keuangan dilingkungan Badan.

URAIAN TUGAS

1. Menyusun rencana program/kegiatan Sub Bagian;
2. Menyelenggarakan administrasi surat menyurat termasuk penanganan arsip di lingkungan Badan;
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan tata naskah dinas di lingkungan Badan;
4. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
5. Menyelenggarakan urusan ketertiban, keamanan, kebersihan, dan keindahan di lingkungan Badan;
6. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan penerimaan tamu, keprotokolan, penyediaan fasilitas rapat-rapat Badan dan upacara kantor;
7. Melaksanakan rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan, inventarisasi dan usul penghapusan barang/Aset Badan;
8. Menghimpun dan mengolah data serta informasi dalam rangka penatausahaan keuangan;
9. Melaksanakan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan SKPD;
10. Melakukan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan SKPD ;
11. Pelaksanaan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang keuangan di lingkungan Badan ;
12. Melakukan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan, meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pembukuan;
13. Melakukan mengoordinasikan dan menyusun kebijakan laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan;
14. Meneliti dan menguji kelengkapan surat permintaan pembayaran dan surat pertanggungjawaban dalam rangka penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
15. Menyiapkan dan mengadministrasikan Surat Perintah Membayar (SPM);
16. Melakukan verifikasi, meneliti dan menguji setiap dokumen/ bukti serta Surat Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran;
17. Melaksanakan akuntansi pengelolaan keuangan anggaran Badan;
18. Melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
19. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN

TUGAS POKOK

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam melakukan kegiatan administrasi, penatausahaan keuangan dan akuntansi serta penyusunan laporan keuangan daerah.

FUNGSI

1. Merumuskan perencanaan program/kegiatan Bidang;
2. Menyusun rumusan penetapan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Menyusun kebijakan Peraturan Kepala Daerah tentang sistem dan prosedur penatausahaan keuangan daerah, mekanisme dan tata cara verifikasi, evaluasi dan laporan keuangan serta analisis atas laporan pertanggungjawaban keuangan SKPD;
4. Mengkoodinasikan dan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah;
5. Menyusun rumusan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
6. Menghimpun laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dari setiap SKPD;
7. Melakukan evaluasi, analisis serta verifikasi atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran SKPD;
8. Menghimpun laporan keuangan SKPD secara periodik;
9. Melakukan pembinaan akuntansi pada setiap SKPD;
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

SUB BIDANG AKUNTANSI PENDAPATAN DAN BELANJA

TUGAS POKOK

Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang dalam menyelenggarakan penatausahaan akuntansi pendapatan dan belanja daerah.

RINCIAN TUGAS

1. Menyusun rencana program/kegiatan Sub Bidang;
2. Menyusun kebijakan peraturan kepala daerah tentang mekanisme dan prosedur akuntansi pendapatan dan belanja daerah;
3. Melakukan pembinaan penatausahaan penerimaan dan belanja daerah pada SKPD;
4. Menyelenggarakan sistem akuntansi pendapatan dan belanja daerah;
5. Menghimpun laporan realisasi pendapatan dan belanja SKPD;
6. Melakukan pembinaan sistem akuntansi pendapatan dan belanja daerah pada SKPD;
7. Menyelenggarakan prosedur akuntansi aset;
8. Menyelenggarakan prosedur selain kas;
9. Mendokumentasikan bukti memorial;
10. Menyusun laporan realisasi keuangan daerah semester pertama dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
11. Melakukan koordinasi dengan SKPD/Unit Kerja lainnya dalam penyusunan laporan keuangan daerah;

12. Menyusun rumusan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

SUB BIDANG VERIFIKASI DAN PELAPORAN

TUGAS POKOK

Sub Bidang Verifikasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang dalam melakukan verifikasi dan tata usaha pendapatan dan belanja daerah.

1. Labuhanbatu Selatan yang Pembangunannya Berkesinambungan, Berkadilang, Bermartabat. Menyusun rencana program/kegiatan Seksi;
2. Menyusun kebijakan peraturan kepala daerah tentang mekanisme dan tata cara evaluasi, analisis dan verifikasi terhadap penerimaan dan belanja daerah;
3. Melakukan evaluasi, analisis dan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pada SKPD;
4. Melakukan evaluasi, analisis dan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pada SKPD;
5. Melaksanakan pengujian kesesuaian atas SPM yang diajukan SKPD terhadap ketersediaan pagu dana;
6. Menerbitkan penolakan SPM atas pengajuan pembayaran belanja;
7. Melaksanakan pembinaan atas penatausahaan keuangan SKPD;
8. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan bahan-bahan petunjuk pemecahan masalah yang berhubungan dengan penatausahaan keuangan;
9. Melakukan koordinasi dengan SKPD/Unit Kerja lainnya dalam penyusunan laporan keuangan daerah, serta menyusun rumusan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

BIDANG ANGGARAN

TUGAS POKOK

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dalam mengoordinasikan, menyusun kebijakan perencanaan dan pedoman pelaksanaan APBD.

FUNGSI

1. Merumuskan perencanaan program/kegiatan Bidang;
2. Menyusun rencana prioritas dan plafon anggaran sementara;
3. Mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan R-APBD dan R-PAPBD;
4. Mengkoordinasikan penyusunan tentang Ranperda APBD dan P-APBD;
5. Mengkoordinasikan, penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD;
6. Meneliti dan memproses pengesahan DPA/DPPA-SKPD;
7. Melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan APBD;
8. Menyusun rumusan penetapan standar analisis belanja;
9. Melaksanakan evaluasi APB Desa;
10. Menyelenggarakan pelaksanaan Sistem Informasi Keuangan Daerah
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN

TUGAS POKOK

Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang dalam penyusunan KUA, PPAS/PPA, R-APBD, R-PAPBD, dan nota keuangan serta proses pengesahan DPA/DPPA SKPD.

URAIAN TUGAS

1. Menyusun rencana program/kegiatan sub bidang;
2. Mengumpulkan bahan-bahan untuk penyusunan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi KUA;
3. Menyusun rencana Prioritas dan Palafon Anggaran Sementara (PPAS) ;
4. Menyusun rancangan nota kesepakatan tentang KUA dan APBD;
5. Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD;
6. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, PAPBD, dan nota keuangan;
7. Mempersiapkan sosialisasi Rancangan APBD/P-APBD;
8. Menyusun Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dan P-APBD;
9. Menyelenggarakan pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah pada sub Bidanganya ;
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

SUB BIDANG EVALUASI DAN PENGENDALIAN ANGGARAN

TUGAS POKOK

Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang dalam pelaksanaan evaluasi dan pengendalian anggaran.

RINCIAN TUGAS

1. Menyusun rencana program/kegiatan sub bidang;
2. Menyusun rumusan Peraturan Bupati tentang Standar Analisa Belanja;
3. Menyusun rumusan Peraturan Bupati tentang Besaran Biaya Perjalanan Dinas;
4. Menyusun rumusan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum;
5. Menyusun rumusan kebijakan yang berkenaan dengan pelaksanaan APBD;
6. Melakukan pengendalian terhadap kemampuan keuangan daerah dengan permintaan dana SKPD;
7. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana;
8. Memberikan informasi kepada pimpinan terhadap keadaan kas daerah pada Bank;
9. Melaksanakan pembinaan dalam penyusunan Rancangan APB Desa;
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

BIDANG PENGELOLAAN ASET DAERAH

TUGAS POKOK

Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dalam mengoordinasikan pembinaan administrasi, pemanfaatan, inventarisasi, penilaian dan perubahan status hukum aset daerah serta mengelola investasi daerah.

FUNGSI

1. Merumuskan rencan program/kegiatan Bidang;
2. Menyusun rumusan penetapan standar satuan harga;
3. Menyusun rumusan penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan Aset daerah;
4. Menyusun rumusan penetapan kebijakan pengelolaan BUMD, lembaga keuangan mikro, Badan Usaha Milik Desa, pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU;
5. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan, penatausahaan Inventaris Kekayaan Milik Daerah (IKMD) ;
6. Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi tentang standar satuan harga, investasi, Aset, BUMD, lembaga keuangan mikro, Badan Usaha Milik Desa, pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU;
7. Menginventarisasi kekayaan daerah;
8. Mengkoordinasikan penilaian Aset daerah;
9. Mengkoordinasikan perubahan status hukum Aset daerah;
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

SUB BIDANG INVENTARISASI ASET DAERAH

TUGAS POKOK

Sub Bidang Inventarisasi Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang dalam penyelenggaraan dan penatusahaan aset daerah.

RINCIAN TUGAS

1. Menyusun rencana program/kegiatan sub bidang;
2. Menyusun kebijakan dan pembinaan tentang kekayaan daerah (investasi, Aset daerah, lembaga keuangan mikro, Badan Usaha Milik Desa dan BLU);
3. Melakukan koordinasi dalam menyusun rumusan kebijakan pembinaan penatausahaan Inventaris Kekayaan Milik Daerah (IKMD) ;
4. Menghimpun dan mengolah data inventaris Aset dari setiap SKPD ;
5. Menyusun rumusan terhadap status hukum mutasi aset daerah;
6. Melakukan sensus barang;
7. Melakukan sertifikasi barang milik daerah;
8. Menyusun laporan inventarisasi barang daerah setiap semester;
9. Mempersiapkan dokumen penyerahan Aset daerah dari SKPD ke pemerintah daerah;
10. Melakukan penelitian terhadap pelaporan, mutatis-mutandis barang inventaris dari setiap SKPD;
11. Menghimpun data dan menyusun laporan pengadaan barang dan pemeliharaan yang merupakan kompilasi realisasi pengadaan setiap 6 (enam) bulan;

12. Mengelola kekayaan daerah yang diperoleh dari hibah, sumbangan, kontrak bagi hasil dari kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atau sejenis ;
13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

SUB BIDANG PEMANFAATAN DAN PENGAMANAN ASET DAERAH

TUGAS POKOK

Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang dalam penyusunan perencanaan pengelolaan pengamanan aset daerah.

RINCIAN TUGAS

1. Menyusun rencana program/kegiatan sub bidang;
2. Menyusun kebijakan pengelolaan investasi daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang;
3. Melakukan sertifikasi barang milik daerah ;
4. Menyusun kebijakan tentang penilaian dan umur ekonomis aset ;
5. Melakukan pengendalian dan pemanfaatan aset
6. Melakukan perencanaan dan penilaian atas Aset permanen maupun non permanen;
7. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain dalam penilaian dan penghapusan aset daerah ;
8. Melaksanakan administrasi perubahan status hukum (penghapusan/ penjualan) dan pinjam pakai aset daerah ;
9. Merencanakan penetapan portofolio pinjaman daerah;
10. Merencanakan pembayaran pelunasan kembali pinjaman daerah;
11. Menyusun dan merencanakan penghapusan utang dan piutang;
12. Mendokumentasikan Bukti Kepemilikan aset daerah ;
13. Mempersiapkan laporan pengelolaan investasi daerah;
14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

TUGAS POKOK

Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good governance digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan dimasa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur BKAD Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih kurang jumlahnya mengingat besarnya beban kerja yang harus diselesaikan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam rangka menjalankan fungsi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Penatausahaan Keuangan sampai bulan Juni 2025 aparatur yang ada berjumlah 24 orang Aparatur Sipil Negara. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi BKAD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 secara rinci dapat disajikan pada tabel berikut ini :

No	Gol / Ruang	Eselon/ Pejabat Fungsional				Jlh
		Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf/PPP K	
1	Kepala Badan	1	-	-	-	1
2	Sekretaris /Sekretariat	-	1	1	3	5
3	Bidang Anggaran	-	1	1	3	5
4	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	-	1	2	2	5
5	Bidang Pengelolaan Aset Daerah	-	1	2	5	8
	Jumlah	-	4	6	13	24

Tabel 2.1 Data PNS Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Per 30 Juni 2025 Berdasarkan Jumlah Eselon Yang Ada

Komposisi pegawai berdasarkan jabatannya di BKAD masih banyak jabatan yang belum terisi sempurna. Belum terpenuhinya semua jabatan di BKAD menyebabkan banyak beban tugas berlebih yang diemban seorang aparatur. Diharapkan ke depannya dapat dipenuhi jabatan-jabatan hingga staf yang tersedia di BKAD sehingga tugas pokok dan fungsi BKAD serta rantai tugas antara staf, eselon IV, eselon III samapai eselon II dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Karena keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada di BKAD, maka perlu ditambah dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak, bahkan untuk beberapa jabatan eselon belum diduduki oleh orang yang tepat sesuai dengan bidang pendidikannya, namun rata-rata SDM yang ada di BKAD sudah memiliki keterampilan dan keahlian di bidangnya masing-masing.

Kondisi kepegawaian BKAD berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

No	Gol / Ruang	Kelamin		Pendidikan								Jlh
		Lk	Pr	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	IV d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	IV c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	IV b	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
4	IV a	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
5	III d	5	5	0	0	0	0	0	0	9	1	10
6	III c	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2
7	III b	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
8	III a	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
9	II d / lic	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	2
10	IX	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
11	Peg. Kontrak	7	5	0	0	2	0	0	1	9	0	12
Jumlah												36

Tabel 2.2 Data ASN dan Pegawai Kontrak BKAD Kabupaten Labuhanbatu Selatan per 30 Juni 2025 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sarana dan prasarana yang dimiliki BKAD Kabupaten Labuhanbatu Selatan per 30 Juni 2025 meliputi tanah, kantor, kendaraan, dan peralatan elektronik dan peralatan dan perlengkapan kator lainnya untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut:

No	Nama Fasilitas	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Jalan Lingkungan/Halaman	1 Paket	Baik
2	Sumur dengan Pompa	2 Paket	Baik
4	Jaringan Distribusi Tegangan Di bawah 1KVA	1 Paket	Baik
5	Gedung Kantor	1 Paket	Baik
6	Loket Dan Ruang Tunggu Pelayanan	1 Paket	Baik
7	Gedung Aula Pertemuan BPKAD	1 Paket	Baik
8	Kendaraan Roda 4	6 Unit	Baik
9	Kendaraan Roda 2	8 Unit	Baik
10	Komputer	23 Unit	Baik
11	Laptop	17 Unit	Baik
12	Mesin Tik	1 Unit	Baik
13	Printer	36 Unit	Baik
14	Scanner	4 Unit	Baik
15	Flasdis	1 Unit	Baik
16	Internet	5 Unit	Baik
17	Mesin Perforasi	3 Unit	Baik
18	Genset	1 Unit	Baik
19	Jam mekanis	5 Unit	Baik
20	Meja Komputer	8 Unit	Baik
21	Meja Kerja	49 Unit	Baik
22	Kursi Kerja	118 Unit	Baik
23	Meja Tamu (Receptionist)	1 Unit	Baik
24	Kursi Tamu	2 Unit	Baik
25	Filling Kabinet	14 Unit	Baik
26	Lemari Besi	7 Unit	Baik
27	Rak Besi	33 Unit	Baik
28	Lemari Arsip Besar	1 Unit	Baik
29	Lemari Kayu	7 Unit	Baik
30	Rak Kayu	17 Unit	Baik
31	Brankas	2 Unit	Baik
32	Televisi	3 Unit	Baik
33	Digital Receiver	1 Unit	Baik
34	AC	20 Unit	Baik
35	Kipas Angin	2 Unit	Baik
36	Pesawat Telepon	1 Unit	Baik
37	Infocus + Slide Proyektor	3 Unit	Baik
38	Kamera Elektrik / Camcorder	2 Unit	Baik
39	Stabilizar	27 Unit	Baik
40	Kamera Digital	2 Unit	Baik
41	LCD KPM	1 Unit	Baik
42	Harddisk Eksternal	6 Unit	Baik
43	Memory	2 Unit	Baik
44	Server	3 Unit	Baik
45	Peralatan Jaringan Komputer	3 Unit	Baik
46	Rod Blower	5 Unit	Baik
47	Distotion Analyzer	2 Unit	Baik
48	Software DAAS	1 Unit	Baik
49	CCTV	6 Unit	Baik
50	Papan Visuil	3 Unit	Baik
51	White Board	4 Unit	Baik
52	Papan Pengumuman	86 Unit	Baik
53	Papan Plank Kantor	2 Unit	Baik
54	Alat Pemadam Kebakaran	5 Unit	Baik
55	Gorden	1 Paket	Baik
56	Mesin Fotocopy	1 Unit	Rusak
57	Mesin absensi	2 Unit	Rusak
58	Mesin Penghancur kertas	2 Unit	Baik
59	Sound System	3 Unit	Baik
60	Dispenser	3 Unit	Baik
61	Faximili	1 Unit	Baik
62	UPS	8 Unit	Baik
63	Tiang Bendera	1 Unit	Baik

Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana BKAD Kab. Labuhanbatu Selatan.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan pelayanan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah sebagai koordinator untuk merumuskan kebijakan dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah dan melakukan pembinaan administrasi keuangan daerah.

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan SKPD. Selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan aset/barang daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset/barang daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengikuti peraturan perundang undangan yang berlaku.

Capaian kinerja pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan tugas dan fungsi menurut indikator sasaran/target serta anggaran dan realisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan periode 2021-2026 disajikan dalam tabel 2.4 sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan rata-rata capaian realisasi selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan berdasarkan Program Kegiatan dan sub kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2024 disajikan dalam tabel 2.5 berikut:

Tabel. 2.5 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

No	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	Anggaran Pada Tahun ke						Realisasi Pada Tahun ke						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke						Rata- Rata Pertumbuhan	
			I	II	III	IV	V	Akhir Periode	I	II	III	IV	V	Akhir Periode	I	II	III	IV	V	Akhir Periode	Anggaran	Realisasi
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN																					
	KEUANGAN		150.236.84 2.519,00	149.189.80 3.478,00	152.944.65 0.816,00	150.348.69 6.141,00	159.193 .363.45 3,00	-	143.863.22 3.919,00	81.644.428. 282,00	78.534.056. 539,64	143.018.69 1.768,00	-	-	95,7 6	54, 73	51, 35	95, 12	0	0	0,04	39,1 5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	16.530.576. 257,00	20.158.375. 484,00	18.430.980. 826,00	18.081.858. 606,00	6.901.8 07.528, 00	-	15.980.651. 890,00	14.035.410. 544,00	15.079.415. 211,00	16.916.345. 463,00	-	-	96,6 7	69, 63	81, 82	93, 55	0	0	3,83	9,81
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase dokumen anggaran yang disusun tepat waktu	133.155.87 6.420,00	128.668.60 2.140,00	133.715.42 9.922,00	131.180.25 4.546,00	151.349 .194.24 4,00	-	127.615.29 2.079,00	67.315.847. 680,00	62.855.349. 305,64	125.165.84 5.531,00	-	-	95,8 4	96, 60	91, 38	95, 42	0	0	0,45	0,37
Persentase ketepatan waktu dalam penatausahaan keuangan daerah																						
Persentase ketepatan waktu penyusunan raperda pertanggungjawaban APBD																						
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase perangkat daerah yang tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah	550.389.84 2,00	362.825.85 4,00	798.240.06 8,00	1.086.582.9 89,00	942.361 .681,00	-	267.279.95 0,00	293.170.05 8,00	599.292.02 3,00	936.500.77 4,00	-	-	48,5 6	80, 8	75, 08	86, 19	0	0	40,7	80,3 4

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan umumnya mencakup beberapa kategori, antara lain:

1. **Perangkat Daerah (OPD):** Sebagai pengguna anggaran, OPD menjadi mitra utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah.
2. **Pemerintah Daerah:** BKAD mendukung kepala daerah dan wakilnya dalam pengelolaan keuangan dan aset secara transparan dan akuntabel.
3. **Masyarakat:** Terutama dalam konteks transparansi anggaran, pelayanan publik, dan pengelolaan aset daerah yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
4. **Lembaga Pengawas dan Auditor:** Seperti BPK dan Inspektorat, yang memerlukan data dan laporan keuangan untuk evaluasi dan audit.
5. **Pemangku Kepentingan Pembangunan:** Termasuk DPRD, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan yang terlibat dalam perencanaan dan pengawasan anggaran.

Kelompok sasaran ini bisa berbeda-beda tergantung pada program dan kebijakan yang diterapkan oleh BKAD.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kesenjangan aspirasi (*aspiration gap*) merupakan perbedaan antara target pembangunan yang telah ditetapkan dengan pencapaian aktual saat ini. Hal ini menggambarkan sejauh mana tujuan-tujuan yang dicanangkan dalam perencanaan pembangunan belum terwujud dalam kondisi nyata di lapangan. Sementara itu, kesenjangan ekspektasi (*expectation gap*) mengacu pada selisih antara kinerja pembangunan yang diproyeksikan dengan realisasi yang telah terlaksana. Kedua jenis kesenjangan ini menjadi indikator penting yang menunjukkan efektivitas proses perencanaan dan implementasi pembangunan daerah. Evaluasi menyeluruh terhadap berbagai permasalahan pembangunan menjadi komponen esensial dalam proses identifikasi dan perumusan isu-isu strategis. Hasil evaluasi tersebut kemudian berfungsi sebagai landasan kokoh dalam penyusunan program dan kegiatan yang dirancang secara khusus untuk mempercepat pencapaian target pembangunan daerah. Tanpa adanya analisis yang komprehensif terhadap kedua kesenjangan tersebut, perencanaan pembangunan berisiko tidak tepat sasaran dan tidak mampu menjawab kebutuhan aktual masyarakat. Pemahaman yang akurat dan mendalam terhadap kesenjangan aspirasi dan ekspektasi memungkinkan pemerintah daerah mengembangkan intervensi yang lebih tepat sasaran dan efektif dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan. Dengan menganalisis secara cermat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan, pengambil kebijakan dapat merumuskan strategi yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan spesifik daerah. Pendekatan ini menjamin bahwa alokasi sumber daya pembangunan dilakukan berdasarkan prioritas yang jelas dan terukur. Pendekatan sistematis dalam analisis kesenjangan tidak hanya memperkuat akuntabilitas dalam proses pembangunan, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas program-program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan adanya mekanisme evaluasi yang jelas dan terukur, tingkat keberhasilan berbagai program dan kegiatan pembangunan dapat dinilai secara objektif. Hal ini menciptakan budaya kinerja yang berorientasi pada hasil dan berdampak positif pada peningkatan kualitas layanan publik secara keseluruhan.

Melalui evaluasi berkelanjutan terhadap kesenjangan aspirasi dan ekspektasi, pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian strategis yang diperlukan untuk memastikan keselarasan antara perencanaan, implementasi, dan hasil pembangunan. Proses adaptasi yang berkelanjutan ini memungkinkan pemerintah daerah untuk merespons dengan cepat terhadap perubahan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Pada akhirnya, pendekatan ini akan mendorong terciptanya pembangunan daerah yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, berikut permasalahan dan akar masalah pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Tabel 2.5 Identifikasi Masalah Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Urusan Keuangan

Identifikasi Masalah	Akar Masalah
Belum maksimalnya sistem pengelolaan aset daerah	Rendahnya tingkat pendataan, pemanfaatan, dan pengawasan terhadap aset yang dimiliki daerah; berdasarkan data KLHS RPJPD Labuhanbatu Selatan 2025-2045, banyak aset daerah yang belum tercatat secara digital, sehingga rawan terhadap kehilangan atau penyalahgunaan; keterbatasan SDM yang memahami pengelolaan aset secara modern; minimnya penerapan teknologi dalam inventarisasi aset.
Belum optimalnya pengelolaan sistem keuangan yang bersih dan transparan	BPS Labuhanbatu Selatan 2023 mencatat adanya keterlambatan dalam pelaporan keuangan dan kurangnya transparansi dalam alokasi anggaran daerah; kurangnya penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan terintegrasi; terbatasnya kapasitas petugas pengelola keuangan; minimnya penerapan prinsip transparansi dalam perencanaan dan pelaporan keuangan.
Keterbatasan kualitas, kapasitas, kompetensi dan integritas SDM di bidang keuangan	Terdapat staf yang bekerja di bidang pengelolaan aset dan keuangan tidak memiliki kompetensi sesuai standar yang dibutuhkan; kurangnya pelatihan berkelanjutan menyebabkan kemampuan mereka tidak berkembang seiring kemajuan teknologi; minimnya sistem rekrutmen berbasis kompetensi untuk pengelola keuangan; kurangnya insentif untuk peningkatan kinerja SDM bidang keuangan.
Optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah	Banyak potensi pendapatan yang belum dimanfaatkan secara maksimal, seperti pajak daerah, retribusi, dan pemanfaatan aset daerah; pengelolaan aset seringkali tidak efektif karena kurangnya pemetaan potensi yang komprehensif; rendahnya inovasi dalam pengembangan sumber pendapatan baru; keterbatasan dalam penerapan teknologi untuk optimalisasi pendapatan daerah di Labuhanbatu Selatan.

Berdasarkan Identifikasi masalah dan akar masalah pada RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tabel 2.5 diatas maka untuk itu mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka peranan BKAD sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasaranan serta sumberdaya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan. Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dibidang pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah, maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, antara lain :

- a. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- b. Semakin berkembangnya dinamika tuntutan pelayanan yang cepat, transparan dan akuntabel.
- c. Masih kurang tersedianya infrastruktur dan teknologi informasi yang menunjang kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- d. Pengelolaan Sistem akuntansi, pengelolaan keuangan dan Aset daerah belum optimal.
- e. OPD belum memahami pedoman penyusunan RKA OPD dan ketentuan yang berlaku.
- f. Laporan Keuangan OPD yang disampaikan belum lengkap sesuai SAP dan tidak tepat waktu
- g. Perubahan yang cepat terhadap regulasi dibidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, yang memaksa Pemerintah Daerah untuk menyesuakannya.
- h. Mempertahankan Opini Laporan Keuangan.

Adapun rekomendasi solusi dan upaya pemecahan terhadap permasalahan tersebut antara lain, yaitu :

- a. Peningkatan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- c. Peningkatan infrastruktur dan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- d. Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- e. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh OPD se Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat.
- f. Melakukan revisi berbagai ketentuan dan peraturan dibidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
- g. Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi pedoman penyusunan anggaran.
- h. Melakukan rekon secara berkala baik terhadap pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Pd	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis Pd
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Belum optimalnya pengelolaan sistem keuangan yang bersih dan transparan	Pengelolaan Sistem akuntansi, pengelolaan keuangan dan Aset daerah belum optimal.	Keterbatasan kualitas, kapasitas, kompetensi dan integritas SDM	Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Global	Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dilakukan untuk mengurangi ketimpangan antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Akuntabel, Transparan dan Kolaboratif	Kurangnya Kapasitas SDM untuk Meningkatkan Efisiensi Pekerjaan Setiap Bidang dalam Melaksanakan Tugas

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

2.2.1.1 TUJUAN RPJMD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Dengan demikian maka berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka tujuan adalah sebagai berikut :

Tujuan I: Mewujudkan Transformasi Sosial yang Diwujudkan Untuk Peningkatan Kualitas SDM dengan Pemberian Akses Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Adaptif. Perencanaan diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, keterampilan, serta penguatan karakter bangsa. Fokusnya adalah membentuk SDM unggul, adaptif, dan inovatif agar mampu menghadapi tantangan global serta mendorong terjadinya transformasi sosial yang berkeadilan. Sasaran yang dituju adalah meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan, terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas dan merata, dan meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif

Tujuan II: Mewujudkan Penguatan Transformasi Ekonomi Yang Diwujudkan Untuk Membangun Perekonomian yang Kuat, Inklusif, dan Jaminan untuk Kesejahteraan Masyarakat. Perencanaan pembangunan ekonomi menitikberatkan pada diversifikasi sektor ekonomi, pemberdayaan UMKM, penguatan investasi, serta pemerataan akses terhadap peluang usaha. Tujuannya menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Sasaran yang dituju adalah terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan sektor-sektor unggulan, meningkatnya kinerja dan daya saing industri pengolahan, dan meningkatnya pemerataan pembangunan ekonomi.

Tujuan III: Mewujudkan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan, Pelayanan Publik yang Prima, dan Memiliki Birokrasi Yang Bersih, Lincah, serta Responsif. Perencanaan difokuskan pada reformasi birokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan digitalisasi pelayanan publik. Hal ini dilakukan agar tata kelola pemerintahan lebih efisien, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta menciptakan birokrasi yang bersih dan terpercaya. Sasaran yang dituju adalah menguatnya birokrasi yang profesional dan pelayanan publik yang prima, bersih, lincah, serta responsif, serta meningkatnya kapasitas keuangan daerah

Tujuan IV: Mewujudkan Lingkungan Yang Aman Dan Memiliki Lingkungan Yang Lestari Serta Menjunjung Tinggi Kearifan Lokal Berbasis Budaya. Perencanaan pembangunan diarahkan pada penguatan sistem keamanan masyarakat, perlindungan lingkungan hidup, konservasi sumber daya alam, serta pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Tujuannya menciptakan harmoni antara pembangunan, pelestarian lingkungan, dan penghargaan terhadap identitas budaya. Sasaran yang dituju adalah terciptanya keamanan dan ketertiban lingkungan, meningkatnya kualitas sarana dan prasarana ramah lingkungan, dan terciptanya kelestarian budaya lokal

Tujuan V: Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Penyediaan Sarana Prasarana Infrastruktur Publik yang Layak Dengan Prinsip Berkesinambungan, Berkeadilan, Dan Bermartabat. Perencanaan menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur yang merata antarwilayah, peningkatan konektivitas, serta pemerataan akses pelayanan dasar. Prinsip keberlanjutan dan keadilan dijadikan landasan agar pembangunan tidak hanya terpusat di perkotaan, tetapi juga menjangkau wilayah terpencil dengan tetap menjaga martabat masyarakat. Sasaran yang dituju adalah meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur dasar.

Tujuan, sasaran, dan indikator memiliki peran penting dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu program atau kebijakan. Adapun maaf utamanya, sebagai berikut:

- a. Penetapan tujuan pembangunan akan memberikan manfaat dalam penyusunan RPJMD Labuhanbatu Selatan yaitu: 1) Memberikan arah yang jelas; 2) Memfokuskan upaya pencapaian output dan outcome; 3) Membangun akuntabilitas.
- b. Penetapan sasaran pembangunan akan memberikan manfaat dalam penyusunan RPJMD Labuhanbatu Selatan yaitu: 1) Memperjelas langkahlangkah dalam mencapai tujuan; 2) Memudahkan pemantauan; 3) Meningkatkan efisiensi.
- c. Penetapan indikator pembangunan akan memberikan manfaat dalam penyusunan RPJMD Labuhanbatu Selatan yaitu: 1) Mengukur kemajuan RPJMD KAB. LABUHANBATU SELATAN PERIODE 2025-2029 304 pembangunan; 2) Mengevaluasi efektivitas dari program dan kebijakan; 3) Membuat penyesuaian jika diperlukan untuk memastikan pencapaian tujuan.

2.2.1.2 SASARAN RPJMD

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan, dan bulanan. Bertitik tolak dari visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan maka sasaran yang akan diwujudkan sebagai berikut:

SASARAN - Misi 3 – Tujuan 3 (Mewujudkan Tata Kelola Kelembagaan, Pelayanan Publik Yang Prima, Dan Memiliki Birokrasi Yang Bersih, Lincah, Serta Responsif).

Artinya Meningkatnya kualitas tata kelola kelembagaan, pelayanan publik yang prima, dan memiliki birokrasi yang bersih, lincah, serta responsif.

Adapun sasarnya:

1. Menguatnya Birokrasi yang Profesional dan pelayanan publik yang prima, bersih, lincah, serta responsif;
2. Meningkatnya Kapasitas Keuangan Daerah.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam proses

pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana yang tercantum dalam Misi Ke-III yaitu :

“Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Tata Kelola Pemerintahannya Memberikan Pelayanan Prima, dan Memiliki Birokrasi yang Bersih, Lincih, serta Responsif”.

Untuk mencapai misi ke tiga ini maka tujuan pembangunan yang menjadi peran Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah “Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (Good Governance and Clean Governance) Serta Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima. Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai yaitu :

“Meningkatnya Kapasitas Keuangan Daerah”

Kesesuaian dengan Tabel Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029 dibawah ini:

Tabel 2.4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) (2024)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2030)
					Tahun I -2025	Tahun II -2026	Tahun III -2027	Tahun IV -2028	Tahun V -2029	
Visi : Labuhanbatu Selatan yang Semakin Modern										
Misi 3 : Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Tata Kelola Pemerintahannya Memberikan Pelayanan Prima, dan Memiliki Birokrasi yang Bersih, Lincih, serta Responsif										
Tujuan RPJMD : Mewujudkan Tata Kelola Kelembagaan, Pelayanan Publik Yang Prima, Dan Memiliki Birokrasi Yang Bersih, Lincih, Serta Responsif	1. Menguatnya Birokrasi yang Profesional dan pelayanan publik yang prima, bersih, lincih, serta responsif	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	87,2	89	91	93	95	97	99
		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	52,97	70	73	76	80	83	85
		Indeks SPBE	Nilai	1,93	2,10	2,22	2,34	2,45	2,55	2,65
		Indeks Reformasi Hukum	Nilai	87,98	89,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00
		Indeks Demokrasi Indonesia	Nilai	75,11	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00	83,00
		Indeks Inovasi Daerah	Nilai	18,02	20	23	26	29	32	34
	2. Meningkatkan Kapasitas Keuangan Daerah	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	Nilai	2,91	3,10	3,22	3,34	3,46	3,58	3,70
		Opini Bpk Atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

2.2.1.3 Telaahan Isu Strtegis Global, Isu Strategis Nasional dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Telaahan Isu Strtegis Global

Isu global yang dipertimbangkan dalam pembangunan jangka panjang Sumatera Utara ialah sebagai berikut:

Ekonomi Global. Kondisi perekonomian global dapat mempengaruhi pengembangan ekonomi di Sumatera Utara terutama dalam hal pengembangan sektor perkebunan dan industri yang berorientasi ekspor. Krisis ekonomi global juga dapat memperlambat investasi sektor ekonomi di Sumatera Utara termasuk investasi untuk pembangunan infrastruktur. Berdasarkan Laporan World Economic Situation and Prospects 2024 dari PBB, prospek ekonomi global masih menghadapi tantangan yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan melambat dari 2,7 persen pada 2023 menjadi 2,4 persen pada 2024, yang berada di bawah tingkat pertumbuhan pra-pandemi sebesar 3,0 persen. Faktor utama yang memperlambat pertumbuhan ini mencakup suku bunga yang masih tinggi, meningkatnya ketegangan geopolitik, perdagangan internasional yang lesu, serta bencana iklim yang semakin sering terjadi. Isu ekonomi global yang menurut PBB perlu menjadi perhatian di akhir 2024, yaitu: (1) Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Global; (2) Ketidakstabilan Geopolitik dan Dampaknya pada Ekonomi; (3) Perubahan Iklim dan Dampaknya pada Ekonomi; (4) Kesenjangan Ekonomi dan Sosial; (5) Peran Teknologi dan Kecerdasan Buatan dalam Ekonomi. Dalam konteks Sumatera Utara, kondisi ekonomi global yang melemah dapat berdampak pada sektor ekspor utama seperti perkebunan dan industri berbasis ekspor. Penurunan permintaan global dan biaya pinjaman yang lebih tinggi bisa memperlambat investasi di daerah ini, termasuk dalam sektor infrastruktur. Selain itu, ketidakpastian ekonomi global juga dapat berdampak pada daya saing produk ekspor dari Sumatera Utara akibat fluktuasi harga komoditas dan kebijakan perdagangan internasional yang lebih ketat.

- a. **Pariwisata Global (Sustainable Tourism).** Menurut laporan terbaru dari Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO), pariwisata global telah pulih hampir 90% dari tingkat sebelum pandemi pada akhir tahun 2024. Sepanjang tahun 2024, tercatat sekitar 1,4 miliar wisatawan internasional, meningkat 11% dibandingkan tahun 2023, atau bertambah sekitar 140 juta perjalanan wisata. Pemulihan ini didorong oleh permintaan pasca-pandemi yang kuat, meningkatnya konektivitas udara, serta kebijakan visa yang lebih longgar di banyak negara. Beberapa wilayah bahkan melampaui tingkat wisata sebelum pandemi. Timur Tengah mencatat peningkatan sebesar 32% dibandingkan tahun 2019, sementara Afrika tumbuh 7% lebih tinggi dari tingkat sebelum pandemi. Eropa mengalami sedikit kenaikan (1% di atas 2019), sedangkan Amerika telah pulih hingga 97%. Di Asia dan Pasifik, pemulihan mencapai 87% dari tingkat sebelum pandemi, mengalami peningkatan signifikan dibandingkan 66% pada akhir 2023. Peningkatan ini juga tercermin

dalam pendapatan pariwisata global, yang mencapai rekor USD 1,9 triliun, sekitar 3% lebih tinggi dibandingkan tahun 2019. Laporan juga menyebutkan bahwa belanja wisatawan tumbuh lebih cepat dibandingkan jumlah kunjungan, yang berdampak positif terhadap ekonomi lokal dan sektor usaha kecil di berbagai negara. Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi dengan potensi wisata unggulan turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ini. Berdasarkan Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional (IPKN) terbaru, Sumatera Utara menempati peringkat ke-14 dengan skor 3.548. Pengembangan pariwisata di wilayah ini terus berfokus pada destinasi unggulan seperti Danau Toba yang menjadi bagian dari 5 Destinasi Super Prioritas pemerintah.

- a. **Demografi Global.** Menurut data World Population Prospects (2024) Populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 8,2 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 10,2 miliar jiwa pada tahun 2080. Hal ini menjadi tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Sementara itu, kebutuhan terhadap pangan, energi, dan air akan semakin meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Dampak dari hal tersebut adalah diperlukan penyesuaian sektor produksi untuk mendorong rentang kehidupan yang semakin Panjang. Meskipun jumlah penduduk terus bertambah, namun laju pertumbuhannya terus melambat. Proyeksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa penduduk global pada tahun 2045 tumbuh menjadi 9,5 miliar penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya Angka Harapan Hidup saat lahir. Di sisi lain terjadi penurunan angka kelahiran yang signifikan di beberapa negara, terutama negara maju. Selain itu bertambahnya penduduk lanjut usia dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan. Mobilitas penduduk dan pergeseran ideologi berisiko memunculkan struktur dan bentuk keluarga yang berbeda. Semakin maraknya fenomena tidak memiliki anak (childfree), menunda pernikahan dan perilaku kehidupan sesama jenis telah menyebabkan turunnya angka kelahiran, sementara itu perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi di negara berkembang. Akses terhadap media digital yang tidak terkendali berisiko meningkatkan kekerasan, perdagangan manusia, adiksi terhadap pornografi, perilaku menyimpang, dan perilaku berisiko anggota keluarga menjadi tantangan bagi keluarga dalam menjalankan fungsinya.
- b. **Pertumbuhan Penduduk dan Urbanisasi Global.** Menurut laporan World Urbanization Prospects, The 2018 Revision yang dirilis PBB memproyeksikan bahwa populasi dunia akan mencapai 8,5 miliar pada tahun 2030 dan 9,7 miliar pada tahun 2050. Diperkirakan bahwa dalam periode 2015-2050, setengah dari pertumbuhan penduduk dunia diperkirakan terkonsentrasi di sembilan negara: India, Nigeria, Pakistan, Republik Demokratik Kongo, Ethiopia, Tanzania, Amerika Serikat, Indonesia dan Uganda. Pada tahun 2018 diperkirakan 55% penduduk dunia tinggal di perkotaan dan diproyeksikan akan meningkat menjadi 68% di tahun 2050. Di beberapa negara jumlah penduduk usia kerja semakin meningkat dan perlu direspons dengan memaksimalkan pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan akses layanan kesehatan, pendidikan, dan promosi peluang kerja produktif dan pekerjaan layak. Pertumbuhan penduduk di atas usia 65 tahun diperkirakan juga semakin meningkat di seluruh dunia dan negara-negara dengan

populasi lanjut usia harus menyesuaikan layanan kesehatan, sistem perawatan jangka panjang, serta meningkatkan keberlanjutan sistem jaminan sosial dan pensiun. Kondisi pertumbuhan penduduk dan urbanisasi global tersebut juga diperkirakan terjadi di Sumatera Utara dimana berdasarkan hasil proyeksi menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia kerja di tahun 2045 diperkirakan akan meningkat. Begitu juga halnya dengan urbanisasi yang kemungkinan terjadi karena perkembangan Wilayah Metropolitan Medan. Urbanisasi juga kemungkinan terjadi dengan berkembangnya kawasan perkotaan baru yang tumbuh akibat adanya pusat kegiatan ekonomi baru.

- c. **Disrupsi Teknologi.** Disrupsi teknologi telah dirasakan secara global dan terjadi dengan mengganggu pasar dan industri yang ada karena mengubah cara bisnis beroperasi, menciptakan model bisnis baru, dan mendisrupsi model bisnis tradisional. Disrupsi teknologi dapat menjadi tantangan bagi usaha dan industri yang telah berjalan, namun menjadi peluang baru terciptanya wirausaha dan startup. Bangkitnya e-commerce yang bahkan memiliki jangkauan pasar dunia mengganggu perdagangan konvensional dan memaksa perusahaan untuk beradaptasi dengan cara baru. Perkembangan teknologi blockchain juga mendisrupsi sistem keuangan yang mengakibatkan terbentuknya sistem transaksi baru. Inovasi dan disrupsi teknologi memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat, perekonomian, dan lingkungan yang dirasakan di seluruh dunia. Inovasi dan disrupsi memiliki dampak kompleks yang perlu dipahami untuk menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan yang tepat dalam mengembangkan dan menggunakan teknologi baru. Inovasi dan disrupsi teknologi yang terjadi secara global berdampak pada perkembangan Provinsi Sumatera Utara di berbagai aspek kehidupan masyarakat, tidak hanya dalam sektor ekonomi tetapi juga mobilitas penduduk dan akses pelayanan publik.
- d. **Perubahan Iklim Global.** Perubahan iklim mengacu pada perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang. Pergeseran tersebut dapat terjadi secara alami, namun sejak tahun 1800-an aktivitas manusia telah menjadi pendorong utama perubahan iklim. Sebagai langkah dalam menghadapi ancaman dampak perubahan iklim yang berjalan semakin cepat, Intergovernmental Negotiating Committee/INC yang kemudian pada tahun 1992 INC mengadopsi sebuah kerangka hukum yaitu United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC dimana Indonesia merupakan salah satu negara yang berpartisipasi didalamnya dengan tujuan akhir yaitu Common but Differentiated Responsibilities Principle. Dalam keikutsertaannya, Indonesia telah meratifikasi perjanjian Paris (Paris Agreement) dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim yang merupakan kesepakatan global yang monumental untuk menghadapi perubahan iklim, pada tataran nasional dengan keikutsertaan Paris Agreement akan mendorong perubahan gaya hidup masyarakat menjadi ramah lingkungan serta adaptif terhadap dampak perubahan iklim, ribuan ilmuwan dan pengawas pemerintah sepakat untuk membatasi kenaikan suhu global tidak lebih dari 1,5°C. Namun, kebijakan yang ada saat ini menunjukkan kenaikan suhu sebesar 3°C pada akhir abad ini. Emisi yang menyebabkan perubahan iklim berasal dari seluruh belahan dunia dan berdampak pada semua orang, namun beberapa negara menghasilkan lebih banyak emisi dibandingkan negara lain. Tujuh negara penghasil emisi terbesar (Tiongkok, Amerika Serikat, India, Uni Eropa, Indonesia, Federasi Rusia, dan Brasil) menyumbang sekitar setengah dari seluruh emisi gas

rumah kaca global pada tahun 2020. Beberapa kerangka dan perjanjian global telah dimiliki dengan tiga kategori tindakan yang harus dilakukan, yaitu: pengurangan emisi; adaptasi terhadap dampak iklim; dan pendanaan untuk penyesuaian yang diperlukan.

- e. **Sumber Energi Alternatif.** Pemanfaatan sumber energi alternatif menjadi inti tantangan perubahan iklim yang dihadapi dunia. Untuk menghindari dampak buruk dari perubahan iklim, berdasarkan Paris Agreement yang diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim, Indonesia berkomitmen untuk ambil bagian mengatasi dampak perubahan iklim global dengan melakukan mitigasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26% bila dilakukan dengan usaha sendiri, atau 41% dengan bantuan dunia internasional. Ketergantungan terhadap bahan bakar fosil perlu diakhiri karena telah menyumbang hingga lebih dari 75% emisi GRK dan 90% emisi karbon dioksida. Investasi pada sumber energi alternatif yang bersih, mudah diakses, terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan menjadi tantangan ke depan. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah berupaya mempercepat pengembangan energi alternatif salah satunya melalui kebijakan yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik dan kebijakan yang relevan lainnya.
- f. **Geopolitik dan Geoekonomi di Samudera Hindia.** Samudera Hindia sangat penting bagi nasib geopolitik dan ekonomi negara-negara pesisir dan kekuatan di luarnya. Samudera Hindia menjadi jalur pelayaran kapal kontainer, penumpang, dan angkatan laut untuk melintasi rute perdagangan yang membentang di seluruh dunia mulai dari Afrika hingga Timur Tengah, Asia, dan Australia. Sebagai tempat bertemunya kekuatan-kekuatan besar di dunia, Samudera Hindia adalah salah satu kawasan perdagangan dan geopolitik paling berharga di dunia dengan lebih dari 80% minyak dunia melewati perairan Samudera Hindia. Hal ini tidak hanya menjadi titik tumpu persaingan strategis antar negara, seperti Tiongkok-India, namun juga merupakan serangkaian peluang ekonomi dan pembangunan yang berharga. Berdasarkan hal tersebut, dilaksanakan “Declaration of The Indian Ocean Rim Association on the Principles for Peaceful, Productive and Sustainable Use of The Indian Ocean and Its Resources” tahun 2013 yang memuat tentang kerja sama keselamatan dan keamanan maritim, fasilitasi perdagangan dan investasi, manajemen perikanan, manajemen risiko bencana, kerja sama akademik dan sains teknologi, serta pertukaran pariwisata dan budaya.

Telaahan Isu Strategis Nasional

Isu nasional yang dipertimbangkan dalam pembangunan jangka menengah Sumatera Utara ialah sebagai berikut:

- a. **Bonus Demografi.** Bonus demografi merupakan kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Indonesia diproyeksikan mengalami puncak bonus demografi pada periode 2020-2030, dimana sekitar 70% penduduk berada pada usia produktif. Kondisi ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk memacu pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan tenaga kerja yang berlimpah. Dalam memaksimalkan bonus demografi, Indonesia perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan

keterampilan, dan penyediaan lapangan kerja yang memadai. Pemerintah telah mencanangkan berbagai program untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja dan mendorong inovasi serta kewirausahaan. Namun, tantangan utama adalah memastikan bahwa penduduk usia produktif memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas dan kesempatan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Jika tidak dikelola dengan baik, bonus demografi dapat berubah menjadi bencana demografi. Indonesia juga menghadapi tantangan dalam hal distribusi penduduk yang tidak merata. Pulau Jawa masih menjadi pusat konsentrasi penduduk, sementara daerah lain seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Papua masih relatif jarang penduduknya. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam pembangunan ekonomi dan penyediaan infrastruktur. Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebagai daerah yang relatif baru di Sumatera Utara, memiliki komposisi penduduk yang didominasi oleh usia produktif. Hal ini memberikan peluang bagi daerah tersebut untuk mengembangkan ekonomi lokalnya, terutama di sektor perkebunan dan pertanian. Namun, tantangan utamanya adalah menciptakan lapangan kerja yang cukup dan berkualitas untuk menampung angkatan kerja yang terus bertambah. Kecenderungan urbanisasi juga mengancam ketersediaan tenaga kerja di sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Pemerintah daerah perlu mengembangkan strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja lokal, sekaligus membuka peluang investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru.

- b. Daya Dukung Sumber Daya Alam dan Daya Tampung.** Daya dukung sumber daya alam di Indonesia diperkirakan akan mengalami penurunan. Daya dukung lahan hutan diperkirakan akan menurun seiring dengan proyeksi hilangnya luas hutan sebesar 10 juta hektar dari tahun 2025 hingga 2026. Daya dukung ketersediaan air juga diperkirakan mengalami tren menuju kelangkaan di sejumlah wilayah di Indonesia dan di tahun 2029 di sebagian wilayah Sumatera diperkirakan berada pada tingkat langka atau kritis. Daya dukung lahan dan air dalam menopang ketahanan pangan diperkirakan juga akan semakin menurun dengan meningkatnya alih fungsi lahan dan penurunan kualitas lahan dan air. Daya tampung kualitas air diperkirakan akan terus menurun dan mengakibatkan krisis air bersih dengan setidaknya 82% dari 550 sungai di Indonesia berstatus tercemar. Daya tampung kualitas udara juga telah melampaui standar mutu dengan peningkatan konsentrasi polutan setiap tahunnya. Daya tampung lingkungan laut juga mengalami penurunan karena aktivitas yang tidak berkelanjutan dan peningkatan persaingan akan ruang laut. Daya tampung lahan juga mengalami penurunan secara kapasitas dan kualitas. Sumatera Utara yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah perlu dikembangkan dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pengembangan ekonomi yang memicu pembangunan fisik secara masif ke depan perlu dilakukan dengan tetap memperhitungkan kondisi lingkungan hidup Sumatera Utara. Pertumbuhan penduduk ke depannya juga akan memicu peningkatan kebutuhan air dan energi yang perlu dikelola secara optimal.
- c. Pembangunan IKN.** Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dilakukan untuk mengurangi ketimpangan antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Dengan ditetapkannya Undang-Undang IKN Nomor 3 Tahun 2022 pembangunan fisik Ibu Kota Nusantara telah dimulai. Pemindehan ibu kota negara ini tidak hanya memindahkan aktivitas pemerintahan, tetapi juga membangun pusat pertumbuhan ekonomi (superhub) ekonomi. Pembangunan IKN diharapkan menjadi sumber pertumbuhan yang berkelanjutan dan menciptakan kehidupan yang

layak dan modern. Pembangunan IKN sebagai superhub ekonomi melalui pengembangan klaster ekonomi yang berdaya saing dan inovatif perlu menjadi pertimbangan ke depan terutama juga untuk menciptakan konektivitas logistik dan rantai pasok ekonomi secara nasional. IKN yang direncanakan akan menjadi superhub dengan klaster ekonomi baru akan mempengaruhi pengembangan ekonomi di Sumatera Utara karena perubahan konektivitas logistik dan rantai pasok yang saat ini terjadi antara Sumatera dan Jawa.

- d. **Kapasitas Ilmu Pengetahuan, teknologi dan Inovasi (IPTEKIN).** Peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi secara nasional masih dihadapkan pada lemahnya komitmen pemerintah, terutama dari segi anggaran yang hanya mencapai 0,28 % dari PDB. Padahal ke depannya kapasitas IPTEKIN menjadi sangat penting untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui peningkatan efisiensi dan penciptaan produk-produk berkualitas dan berteknologi tinggi. Penguatan fondasi infrastruktur dasar riset dan inovasi masih menghadapi tantangan pada pemerataan distribusi kuantitas dan kualitas peneliti/periset, serta masih belum optimalnya kuantitas dan kualitas inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah, terutama inovasi berbasis sains dan teknologi yang bersifat applied dan evidence based. Perluasan kemitraan ekosistem riset dan inovasi juga masih belum optimal, terutama pada kolaborasi stakeholders dalam meningkatkan difusi dan inkubasi teknologi inovasi yang dapat direplikasi dan berkelanjutan, khususnya dalam pengembangan klaster dan teknologi inovasi berbasis produk unggulan daerah.
- e. **Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah.** Kontribusi industri pengolahan terhadap PDB semakin menurun akibat terjadinya pelemahan sektor manufaktur, rendahnya produktivitas faktor faktor produksi, terbatasnya kemampuan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil industri di luar Jawa, dan terjadinya ekonomi biaya tinggi akibat biaya logistik dan suku bunga. Produktivitas sektor pertanian juga terus melambat dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 yang disebabkan banyak faktor, misalnya regenerasi petani dan nelayan, kurangnya keterampilan, terbatasnya adopsi teknologi dan akses keuangan, kelembagaan ekonomi petani dan nelayan, serta berkurangnya daya dukung lahan pertanian.
- f. **Pemanfaatan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.** Pemanfaatan potensi pariwisata sebagai destinasi unggulan dunia yang berkelanjutan terus mengukuhkan ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi baru, menjadikannya barometer terdepan dalam arena ekonomi kreatif global. Dengan mengangkat kekayaan budaya, seni, dan kearifan lokal, serta mendorong kreativitas talenta Sumatera Utara, kita membuka peluang untuk memberikan nilai tambah yang tinggi secara global.
- g. **Optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi laut.** Indonesia memiliki potensi ekonomi laut yang tinggi, namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk penciptaan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan. Rendahnya pemanfaatan sumber daya laut serta belum berkembangnya pemanfaatan Sea Lines of Communication (SLoC) dan ALKI menyebabkan kontribusi PDB kemaritiman masih berada di kisaran 7,60%. Selain itu, masih juga terdapat tantangan degradasi lingkungan laut, tingginya kegiatan ilegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF), dan belum optimalnya tata kelola dan regulasi pemanfaatan ruang laut.

- h. Produktivitas Tenaga Kerja.** Produktivitas tenaga kerja Indonesia dalam kurun waktu tahun 2010-2022 masih relatif tertinggal, dengan nilai US\$7.274,9 per pekerja dan berada di bawah rata-rata pekerja di kawasan ASEAN. Peningkatan produktivitas tenaga kerja juga dihadapkan dengan rendahnya kualitas SDM, yang masih didominasi oleh tingkat pendidikan SMP ke bawah. Tantangan lainnya ialah ketidaksesuaian keahlian (mismatch) antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, informasi pasar tenaga kerja yang belum baik, dan pasar kerja Indonesia yang belum mampu merespons perubahan cepat jenis lapangan kerja, kebutuhan keahlian, struktur penduduk, serta pola budaya kerja.

Telahaan Isu Strategis Provinsi

Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara diidentifikasi dan dirumuskan berdasarkan Isu Global, Isu Nasional, Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan dalam KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan permasalahan yang dihadapi Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2024 serta tantangan yang mungkin dihadapi 5 (lima) tahun yang akan datang, isu strategis Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Isu-isu strategis Sumatera Utara yang diharapkan dapat teratasi dalam pembangunan jangka panjang (2025–2029) diuraikan sebagai berikut:

a. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia dihadapkan pada pembangunan dan Pembentukan modal manusia.

Modal manusia tersebut dapat terwujud apabila setiap individu sehat, terdidik, dan terlindungi dari berbagai risiko siklus hidup. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan Transformasi Sosial yang menitikberatkan pada penuntasan pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Transformasi Sosial diperlukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup sehingga mampu melahirkan manusia sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing. Pembangunan kesehatan dihadapkan pada peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit, penguatan dan pemerataan kapasitas ketahanan kesehatan, serta responsiveness/ketanggapan sistem kesehatan di seluruh wilayah.

Pembangunan pendidikan dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang sedangkan Perlindungan sosial yang adaptif ditujukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif.

Selanjutnya sistem demokrasi masih prosedural ditandai dengan kapasitas dan kemandirian masyarakat sipil belum kuat; belum terjaminnya kebebasan dan kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik; informasi dan komunikasi publik belum merata; permasalahan politik elektoral seperti politik uang, politisasi isu SARA; nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi yang belum terinternalisasi serta sistem kaderisasi partai politik belum maksimal. Selain hal di atas nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan konservasi lingkungan menjadi dimensi dasar dalam proses pembangunan kualitas sumber daya manusia. Agama dan kebudayaan harus

menjadi landasan spiritual, etika, dan moral dalam penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Dalam hal ini, sumber daya manusia berperan sebagai katalisator transformasi pembangunan dengan dukungan keluarga sebagai institusi internalisasi nilai positif dan pembangunan integritas karakter individu. Selain itu, perlu dipastikan terselenggaranya kebijakan pemerintah yang ramah gender serta inklusif bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas dan lanjut usia, untuk pemerataan pembangunan dan layanan dasar yang optimal.

b. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas ke destinasi wisata unggulan seperti Danau Toba, Nias, dan Bukit Lawang.

Untuk meningkatkan daya tarik wisata, diperlukan pembangunan dan perbaikan jalan, bandara, serta transportasi publik yang lebih terintegrasi. Selain itu, penyediaan fasilitas pendukung seperti hotel, restoran, dan pusat informasi wisata yang berkualitas juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kenyamanan wisatawan dan memperpanjang durasi kunjungan mereka.

Selain infrastruktur, penguatan ekonomi kreatif juga menjadi kunci dalam mendukung sektor pariwisata. Pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang bergerak di bidang kerajinan tangan, kuliner khas, serta seni pertunjukan perlu mendapatkan pembinaan dan akses permodalan yang lebih baik. Digitalisasi usaha ekonomi kreatif, seperti pemasaran berbasis e-commerce dan promosi melalui platform media sosial, juga harus diperkuat agar produk-produk lokal dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan demikian, ekonomi kreatif tidak hanya mendukung industri pariwisata tetapi juga memberikan peluang kerja yang lebih besar bagi masyarakat lokal.

Keberlanjutan lingkungan dan pelestarian budaya harus menjadi fokus dalam pengembangan sektor ini. Pariwisata berbasis alam dan budaya perlu dikembangkan dengan tetap menjaga ekosistem dan kearifan lokal agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Edukasi kepada masyarakat dan pelaku wisata mengenai pentingnya ekowisata serta pengelolaan sampah di kawasan wisata harus ditingkatkan.

**c. Pembangunan sarana dan prasarana yang merata dan berkeadilan
Pembangunan sarana dan prasarana yang belum memadai masih menjadi persoalan pembangunan yang perlu direspons ke depan.**

Luasan permukiman kumuh, rumah tangga dengan akses air minum layak, rumah tangga dengan akses sanitasi layak infrastruktur SDA dalam kondisi baik, penanganan banjir merupakan isu-isu penyediaan infrastruktur yang perlu direspons dalam jangka panjang ke depan. Cakupan rumah tangga yang menempati hunian layak yang terpadu dengan akses air minum, sanitasi dan penanganan persampahan juga masih cukup rendah. Selain itu, kondisi kawasan perkotaan di Provinsi Sumatera Utara menghadapi perkotaan arah perkembangan yang tidak terstruktur (urban sprawl). Kelayakan dan keandalan perumahan yang dibangun secara swadaya juga perlu menjadi perhatian mengingat tingginya risiko bencana di Provinsi Sumatera Utara.

d. Pembangunan antar daerah serta desa-kota.

Keterkaitan antar daerah serta desa-kota di Provinsi Sumatera Utara belum mencerminkan keterkaitan tidak bisa mengabaikan rantai pasok, sehingga wilayah

kota dan kawasan-kawasan perlu memiliki rantai nilai dengan wilayah-wilayah lain untuk mendorong perekonomian yang merata. Pembangunan wilayah Mebidangro (Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Karo) masih menghadapi permukiman kumuh seperti air bersih dan sanitasi, penurunan kualitas lingkungan hidup, dan infrastruktur transportasi massal yang belum mendukung mobilitas penduduk. Permasalahan ini muncul sebagai akibat dari urbanisasi yang tidak terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang berpusat di inti bisnis dan perdagangan. wilayah pertumbuhan ekonomi yang pesat menjadi pull factor manusia bermigrasi ke wilayah dengan ekonomi yang relatif baik.

e. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Berkelanjutan.

Dalam upaya pengelolaan SDA berkelanjutan menjadi perhatian terhadap pengelolaan investasi berbasis lahan yang belum seluruhnya mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik terutama kelestarian lingkungan dan menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. Pengoptimalan pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup berkelanjutan juga berkaitan dengan: adaptasi perubahan iklim; pengawasan terhadap deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan dan harmonisasi antara manusia dengan satwa liar; akses dan partisipasi masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok marginal; dukungan dalam mewujudkan kelestarian dan kesejahteraan yang rendah; belum maksimalnya akses seluruh masyarakat terhadap energi, dan peningkatan pemanfaatan sumber energi terbarukan.

f. Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur.

Infrastruktur yang berkaitan dengan konektivitas dan sistem logistik berpotensi menekan aktivitas ekonomi berupa mahalnya biaya logistik dari wilayah penghasil komoditas menuju lokasi pengolahan dan pemasaran. Hal tersebut perlu diupayakan dengan upaya meningkatkan kelancaran arus barang, jasa, dan informasi, menurunkan biaya logistik, mengurangi ekonomi biaya tinggi, mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah, dan mewujudkan sinergi antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Aksesibilitas daerah juga dapat ditinjau dari ketersediaan fasilitas perhubungan yang meliputi darat, laut dan udara. Perhubungan darat di dibagi atas beberapa bagian jaringan transportasi seperti jaringan angkutan jalan raya, jaringan jalur kereta api, jaringan angkutan sungai dan danau, dan jaringan angkutan penyeberangan.

g. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Akuntabel, Transparan dan Kolaboratif.

Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi dua persoalan utama yaitu memperbaiki tata kelola pemerintahan yang fokus pada kapabilitas dan integritas dan memperbaiki kualitas pelayanan publik yang belum optimal kepada masyarakat. Kapabilitas tata pemerintahan berfokus pada penguatan transisi reformasi birokrasi menuju reformasi Birokrasi tematik, memperbaiki proses bisnis adaptif dengan dukungan teknologi informasi, meningkatkan profesionalisme ASN melalui meritokrasi dan penguatan core value.

Isu-isu berkaitan dengan tata kelola pemerintahan lainnya ialah pemanfaatan kehadiran teknologi informasi dalam area deregulasi kebijakan, penataan kelembagaan, penguatan profesionalisme ASN, penguatan kualitas pengawasan, penguatan akuntabilitas dan pelayanan publik. Ketersediaan dan keterjangkauan

teknologi pada masyarakat sipil diharapkan mampu mentransformasi posisi masyarakat dari objek menjadi subjek pembangunan.

2.2.1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah

RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih rinci sebagai acuan operasional pelayanan pemanfaatan ruang kota. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017-2037 yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 bahwatujuan RTRW Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah ***“MEWUJUDKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN YANG AMAN, NYAMAN, PRODUKTIF DAN BERKELANJUTAN YANG BERBASIS PERKEBUNAN DENGAN MEMANFAATKAN POSISI STRATEGIS YANG BERADA PADA JALUR LINTAS TIMUR DAN PENGHUBUNG JALUR LINTAS BARAT SUMATERA”***.

Perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utamakabupaten dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan (20 tahun). Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berfungsi :

1. Sebagai acuan bagi pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan masyarakat dalam pemrograman pemanfaatan ruang;
2. Sebagai arahan untuk sektor dalam penyusunan program utama (besaran, lokasi, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan);
3. Sebagai dasar estimasi kebutuhan pembiayaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pertama; dan
4. Sebagai acuan bagi masyarakat dalam melakukan investasi.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan disusun berdasarkan :

1. Rencana struktur ruang dan pola ruang;
2. Ketersediaan sumber daya dan sumber dana pembangunan;
3. Kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan; dan
4. Prioritas pengembangan wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan pentahapan rencana pelaksanaan program sesuai dengan RPJPD dan RPJMD.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan disusun dengan kriteria:

1. Mendukung perwujudan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis kabupaten;
2. Mendukung program utama penataan ruang nasional dan provinsi;
3. Realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;

4. Konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun antar lima tahunan; dan
5. Sinkronisasi antar program harus terjaga.

Dalam tata kelola pemerintahan yang baik menerapkan kaidah “Good Governance”. Dalam penerapannya mengikutsertakan beberapa stakeholder yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Masing-masing stakeholder mempunyai peranan sendiri dalam sistem pembangunan berkelanjutan suatu wilayah atau dapat dikatakan bahwa good governance merupakan upaya kerja sama dalam proses pembangunan berkelanjutan, dilakukan dalam skala pemerintahan daerah, kelompok masyarakat sosial, dan sektor bisnis swasta.

Dimana penerapan good governance memiliki empat elemen penting didalamnya yaitu :

1. Akuntabilitas

Pejabat publik harus bertanggung jawab untuk perilaku pemerintah, dan responsive terhadap identitas dari mana otoritas mereka berasal. Pemerintah harus meningkatkan akuntabilitas dalam membangun kapasitas setiap pejabat publik untuk melakukan reformasi ekonomi, dan reformasi di segala sektor dan melaksanakannya dengan sukses.

2. Partisipasi

Partisipasi mengacu pada keterlibatan warga dalam proses pembangunan. Penerima manfaat dan kelompok-kelompok yang terkena dampak proyek perlu berpartisipasi sehingga pemerintah dapat membuat pilihan informasi sehubungan dengan kebutuhan mereka, dan kelompok-kelompok sosial dapat melindungi hak-hak mereka.

3. Prediktabilitas

Prediktabilitas adalah tentang keadilan konsistensi dalam penerapan hukum-hukum dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Penerapan hukum negara harus kondusif bagi pembangunan. Sebuah pemerintah harus mampu mengatur pemerintahannya melalui undang-undang, peraturan dan kebijakan, yang mencakup baik hak dan kewajiban didefinisikan, mekanisme untuk penegakan hukum, dan penyelesaian sengketa tidak memihak.

4. Transparansi

Transparansi ialah ketersediaan informasi kepada masyarakat dan kejelasan tentang peraturan pemerintah, peraturan, dan keputusan. Hal ini dapat diperkuat melalui hak masyarakat untuk memperoleh informasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Transparansi dalam pengambilan keputusan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan publik mengurangi ketidakpastian dan dapat membantu mencegah korupsi di kalangan pejabat publik.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup menurut Undang–Undang Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup

lainnya. Kualitas lingkungan hidup menjamin keberlangsungan sumber daya dan kehidupan manusia yang diintegrasikan melalui kebijakan dan peraturan dari pemerintah setempat untuk melestarikannya.

Sebagaimana ditetapkan dalam UUPPLH No. 32 Tahun 2009 (Pasal 15, ayat 3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme: 1. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah; 2. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; 3. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis di Indonesia juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Apabila prinsip – prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari. Berdasarkan ketentuan pasal 13 PP 46 tahun 2016 dan pasal 23 ayat 4 Permen LHK No P 69 tahun 2017 analisis materi muatan KRP dikaji dengan paling sedikit 6 muatan, yaitu : Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, Kinerja layanan/jasa ekosistem, Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah wajib menyusun KLHS RPJMD untuk mewujudkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Penyelenggaraan KLHS khususnya untuk RPJMD untuk Pemerintah Daerah baik Provinsi ataupun Kabupaten/ Kota berdasarkan Permendagri No.7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, merupakan analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. Pelaksanaan KLHS RPJMD adalah rangkaian proses mengumpulkan, menganalisis, dan menghasilkan informasi; rangkaian proses dialog pihak-pihak yang berkepentingan; dan rangkaian proses mengintegrasikan hasilnya dalam dokumen perencanaan RPJMD.

Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah dan kewenangan otonomi daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Analisis Capaian TPB pada Organisasi Perangkat Daerah yang diampu Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan KLHS Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah sebagai berikut

Tabel. 5.17. Capaian TPB Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah

No.Ind	INDIKATOR	PERPRES 59/2017 (RINGKASAN)	Satuan	Capaian 2022	Target 2022	Status
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan dan Perlindungan Sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Meningkat	%	43	Meningkat	SS
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Meningkat	% Realisasi Belanja terhadap Anggaran	87	Meningkat	SB
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65%	Ya/Tidak Opini WTP	WTP	WTP	SS

Sumber data : Hasil Analisis

Dari 3 Indikator yang menjadi tugas dan kewenangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan 1 Indikator belum mencapai target dan 2 Indikator lainnya sudah mencapai target. Realisasi Anggaran Terkait Pelaksanaan Capaian TPB pada Tahun 2022 Sebesar Rp.517.281.320. Berdasarkan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bahwa permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Keuangan dan Aset Daerah manusia adalah: 1. Belum maksimalnya sistem pengelolaan aset daerah; 2. Belum optimalnya pengelolaan sistem keuangan yang bersih dan transparan; 3. Keterbatasan kualitas, kapasitas, kompetensi dan integritas SDM; 4. Belum optimalnya kerjasama dengan instansi penegak hukum dan sesama OPD; 5. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang tugas dan fungsi yang belum memadai.

2.2.1.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Kesenjangan aspirasi (aspiration gap) merupakan perbedaan antara target pembangunan yang telah ditetapkan dengan pencapaian aktual saat ini. Hal ini menggambarkan sejauh mana tujuan-tujuan yang dicanangkan dalam perencanaan pembangunan belum terwujud dalam kondisi nyata di lapangan. Sementara itu, kesenjangan ekspektasi (expectation gap) mengacu pada selisih antara kinerja pembangunan yang diproyeksikan dengan realisasi yang telah terlaksana. Kedua jenis kesenjangan ini menjadi indikator penting yang menunjukkan efektivitas proses perencanaan dan implementasi pembangunan daerah.

Evaluasi menyeluruh terhadap berbagai permasalahan pembangunan menjadi komponen esensial dalam proses identifikasi dan perumusan isu-isu strategis. Hasil evaluasi tersebut kemudian berfungsi sebagai landasan kokoh dalam penyusunan program dan kegiatan yang dirancang secara khusus untuk

mempercepat pencapaian target pembangunan daerah. Tanpa adanya analisis yang komprehensif terhadap kedua kesenjangan tersebut, perencanaan pembangunan berisiko tidak tepat sasaran dan tidak mampu menjawab kebutuhan aktual masyarakat.

Pemahaman yang akurat dan mendalam terhadap kesenjangan aspirasi dan ekspektasi memungkinkan pemerintah daerah mengembangkan intervensi yang lebih tepat sasaran dan efektif dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan. Dengan menganalisis secara cermat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan, pengambil kebijakan dapat merumuskan strategi yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan spesifik daerah. Pendekatan ini menjamin bahwa alokasi sumber daya pembangunan dilakukan berdasarkan prioritas yang jelas dan terukur.

Dengan mengintegrasikan analisis kesenjangan ke dalam kerangka perencanaan strategis, para pemangku kepentingan dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih optimal dan mengidentifikasi prioritas pembangunan yang memerlukan perhatian khusus. Proses ini memungkinkan terciptanya sinergi antara berbagai sektor pembangunan dan memastikan bahwa intervensi yang dilakukan bersifat holistik dan terintegrasi. Selain itu, analisis kesenjangan juga membantu dalam memetakan potensi dan kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan daerah.

Pendekatan sistematis dalam analisis kesenjangan tidak hanya memperkuat akuntabilitas dalam proses pembangunan, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas program-program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan adanya mekanisme evaluasi yang jelas dan terukur, tingkat keberhasilan berbagai program dan kegiatan pembangunan dapat dinilai secara objektif. Hal ini menciptakan budaya kinerja yang berorientasi pada hasil dan berdampak positif pada peningkatan kualitas layanan publik secara keseluruhan.

Melalui evaluasi berkelanjutan terhadap kesenjangan aspirasi dan ekspektasi, pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian strategis yang diperlukan untuk memastikan keselarasan antara perencanaan, implementasi, dan hasil pembangunan. Proses adaptasi yang berkelanjutan ini memungkinkan pemerintah daerah untuk merespons dengan cepat terhadap perubahan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Pada akhirnya, pendekatan ini akan mendorong terciptanya pembangunan daerah yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, berikut permasalahan dan akar masalah pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Urusan Keuangan:

Tabel 2.5 Identifikasi Masalah Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**Urusan Keuangan**

Identifikasi Masalah	Akar Masalah
Belum maksimalnya sistem pengelolaan aset daerah	Rendahnya tingkat pendataan, pemanfaatan, dan pengawasan terhadap aset yang dimiliki daerah; berdasarkan data KLHS RPJPD Labuhanbatu Selatan 2025-2045, banyak aset daerah yang belum tercatat secara digital, sehingga rawan terhadap kehilangan atau penyalahgunaan; keterbatasan SDM yang memahami pengelolaan aset secara modern; minimnya penerapan teknologi dalam inventarisasi aset.
Belum optimalnya pengelolaan sistem keuangan yang bersih dan transparan	BPS Labuhanbatu Selatan 2023 mencatat adanya keterlambatan dalam pelaporan keuangan dan kurangnya transparansi dalam alokasi anggaran daerah; kurangnya penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan terintegrasi; terbatasnya kapasitas petugas pengelola keuangan; minimnya penerapan prinsip transparansi dalam perencanaan dan pelaporan keuangan.
Keterbatasan kualitas, kapasitas, kompetensi dan integritas SDM di bidang keuangan	Terdapat staf yang bekerja di bidang pengelolaan aset dan keuangan tidak memiliki kompetensi sesuai standar yang dibutuhkan; kurangnya pelatihan berkelanjutan menyebabkan kemampuan mereka tidak berkembang seiring kemajuan teknologi; minimnya sistem rekrutmen berbasis kompetensi untuk pengelola keuangan; kurangnya insentif untuk peningkatan kinerja SDM bidang keuangan.
Optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah	Banyak potensi pendapatan yang belum dimanfaatkan secara maksimal, seperti pajak daerah, retribusi, dan pemanfaatan aset daerah; pengelolaan aset seringkali tidak efektif karena kurangnya pemetaan potensi yang komprehensif; rendahnya inovasi dalam pengembangan sumber pendapatan baru; keterbatasan dalam penerapan teknologi untuk optimalisasi pendapatan daerah di Labuhanbatu Selatan.

Berdasarkan Identifikasi masalah dan akar masalah pada RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tabel 2.5 diatas maka untuk itu mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka peranan BKAD sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumberdaya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan. Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dibidang pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah, maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, antara lain :

- a. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- b. Semakin berkembangnya dinamika tuntutan pelayanan yang cepat, transparan dan akuntabel.
- c. Masih kurang tersedianya infrastruktur dan teknologi informasi yang menunjang kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- d. Pengelolaan Sistem akuntansi, pengelolaan keuangan dan Aset daerah belum optimal.

- e. OPD belum memahami pedoman penyusunan RKA OPD dan ketentuan yang berlaku.
- f. Laporan Keuangan OPD yang disampaikan belum lengkap sesuai SAP dan tidak tepat waktu
- g. Perubahan yang cepat terhadap regulasi dibidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, yang memaksa Pemerintah Daerah untuk menyesuaikannya.
- h. Mempertahankan Opini Laporan Keuangan.

Adapun rekomendasi solusi dan upaya pemecahan terhadap permasalahan tersebut antara lain, yaitu :

- a. Peningkatan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- c. Peningkatan infrastruktur dan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- d. Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- e. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh OPD se Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat.
- f. Melakukan revisi berbagai ketentuan dan peraturan dibidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
- g. Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi pedoman penyusunan anggaran.
- h. Melakukan rekon secara berkala baik terhadap pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja PD selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Baik tujuan maupun sasaran, keduanya merupakan bagian penting dari dokumen perencanaan untuk mengarahkan kinerja dan pelaksanaan program secara sistematis dan terukur dalam periode tertentu.

RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan arsitektur kinerja berupa alir visi misi hingga program. Tujuan dan Sasaran RPJMD merupakan hasil dari perumusan capaian strategis Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang merepresentasikan atau tolok ukur keberhasilan atau kegagalan pemerintah. Sehingga, syarat utama penentuan tujuan dan sasaran adalah measurable yang direpresentasikan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) atau indikator tujuan sebagai indikator keberhasilan bupati dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) atau indikator kinerja sasaran RPJMD.

Tujuan I: Mewujudkan penguatan transformasi sosial yang diwujudkan untuk membangun SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing yang hebat. Dalam rangka pencapaian Misi 1 yaitu: Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Sosialnya Diwujudkan untuk Membangun SDM yang Berkualitas dan Memiliki Daya Saing yang Hebat, maka sasaran yang ditetapkan adalah Meningkatkan kualitas SDM dengan pemberian akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang adaptif. Sedangkan indikator yang digunakan yaitu: Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Tujuan II: Mewujudkan penguatan transformasi ekonomi yang diwujudkan untuk membangun perekonomian yang kuat, inklusif, dan jaminan untuk kesejahteraan Masyarakat. Dalam rangka pencapaian Misi 2 yaitu: Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Ekonominya diwujudkan untuk Membangun Perekonomian yang Kuat, Inklusif, dan untuk Kesejahteraan Masyarakat, maka sasaran yang ditetapkan adalah Meningkatkan perekonomian yang kuat, inklusif, dan jaminan untuk kesejahteraan masyarakat. Sedangkan indikator yang digunakan yaitu: 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (%); 2) PDRB Per Kapita; 3) Kontribusi PDRB Industri; 4) Tingkat Kemiskinan yang Menurun (%); 5) Tingkat Pengangguran Terbuka (%).

Tujuan III: Mewujudkan penguatan tata kelola kelembagaan, pelayanan publik yang prima, dan memiliki birokrasi yang bersih, lincah, serta responsif. Dalam rangka pencapaian Misi 3 yaitu: Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Tata Kelola Pemerintahannya Memberikan Pelayanan Prima, dan Memiliki Birokrasi yang Bersih, Lincah, serta Responsif, maka sasaran yang ditetapkan adalah Meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan, pelayanan publik yang prima, dan memiliki birokrasi yang bersih, lincah, serta responsif. Sedangkan indikator yang digunakan yaitu: 1) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat; 2) Index SPBE; 3) Nilai SAKIP yang Meningkatkan; 4) Nilai Indeks RB yang Meningkatkan; 5) Nilai Sistem Merit yang Meningkatkan.

Tujuan IV: Mewujudkan lingkungan yang aman dan memiliki lingkungan yang lestari serta menjunjung tinggi kearifan lokal berbasis budaya. Dalam rangka pencapaian Misi 4 yaitu: Labuhanbatu Selatan yang Wilayahnya Aman dan Memiliki Lingkungan yang Lestari serta Menjunjung Tinggi Budaya, maka sasaran yang ditetapkan adalah Meningkatnya kondisi lingkungan yang aman dan lestari serta menjunjung tinggi kearifan lokal berbasis budaya. Sedangkan indikator yang digunakan yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Tujuan V: Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan penyediaan sarana prasarana infrastruktur publik yang layak dengan prinsip berkesinambungan, berkeadilan, dan bermartabat. Dalam rangka pencapaian Misi 5 yaitu: Labuhanbatu Selatan yang Pembangunan Wilayahnya Merata dengan Sarana Prasarana Infrastruktur Publik Berkualitas dan Mengedepankan Prinsip Berkesinambungan, Berkeadilan, dan Bermartabat, maka sasaran yang ditetapkan adalah Meningkatnya pembangunan kewilayahan yang merata dan penyediaan sarana prasarana infrastruktur publik yang layak dengan prinsip kesinambungan, keadilan, dan bermartabat. Sedangkan indikator yang digunakan yaitu Presentase Pembangunan Jalan.

Tujuan, sasaran, dan indikator memiliki peran penting dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu program atau kebijakan. Adapun manfaat utamanya, sebagai berikut: a. Penetapan tujuan pembangunan akan memberikan manfaat dalam penyusunan RPJMD Labuhanbatu Selatan yaitu: 1) Memberikan arah yang jelas; 2) Memfokuskan upaya pencapaian output dan outcome; 3) Membangun akuntabilitas. b. Penetapan sasaran pembangunan akan memberikan manfaat dalam penyusunan RPJMD Labuhanbatu Selatan yaitu: 1) Memperjelas langkah langkah dalam mencapai tujuan; 2) Memudahkan pemantauan; 3) Meningkatkan efisiensi. c. Penetapan indikator pembangunan akan memberikan manfaat dalam penyusunan RPJMD Labuhanbatu Selatan yaitu: 1) Mengukur kemajuan pembangunan; 2) Mengevaluasi efektivitas dari program dan kebijakan; 3) Membuat penyesuaian jika diperlukan untuk memastikan pencapaian tujuan.

Tujuan di dalam Renstra merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Kepala Daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai dan berfungsi sebagai panduan dalam mengukur dan menilai pencapaian visi dan misi tersebut.

Tujuan dalam Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 - 2029 harus lebih tajam dari misi, tetapi masih cukup luas untuk dapat mendorong lahirnya kreatifitas dan inovasi untuk mencapainya bagi semua unit kerja yang ada di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Adapun rumusan tujuan yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029 yaitu disajikan dalam Tabel 3.2.

Untuk itu diharapkan seluruh aparatur pada Badan Keuangan dan Aset Daerah senantiasa berkomitmen serta berusaha bekerja semaksimal mungkin untuk meningkatkan pelayanan, tanggap, kreatif dan mampu mengambil inisiatif dalam perbaikan sistem dan pola kerja.

3.2 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan yang diinginkan tersebut maka ditetapkan sasaran yang akan dicapai untuk mengimplementasikan misi ke 3 (tiga) dari bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang dapat disajikan dalam Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) (2024)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2030)
					Tahun I -2025	Tahun II -2026	Tahun III -2027	Tahun IV -2028	Tahun V -2029	
Visi : Labuhanbatu Selatan yang Semakin Modern										
Misi 3 : Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Tata Kelola Pemerintahannya Memberikan Pelayanan Prima, dan Memiliki Birokrasi yang Bersih, Lincih, serta Responsif										
Tujuan RPJMD : Mewujudkan Tata Kelola Kelembagaan, Pelayanan Publik Yang Prima, Dan Memiliki Birokrasi Yang Bersih, Lincih, Serta Responsif	1. Menguatnya Birokrasi yang Profesional dan pelayanan publik yang prima, bersih, lincih, serta responsif	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	87,2	89	91	93	95	97	99
		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	52,97	70	73	76	80	83	85
		Indeks SPBE	Nilai	1,93	2,10	2,22	2,34	2,45	2,55	2,65
		Indeks Reformasi Hukum	Nilai	87,98	89,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00
		Indeks Demokrasi Indonesia	Nilai	75,11	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00	83,00
		Indeks Inovasi Daerah	Nilai	18,02	20	23	26	29	32	34
	2. Meningkatnya Kapasitas Keuangan Daerah	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	Nilai	2,91	3,10	3,22	3,34	3,46	3,58	3,70
		Opini Bpk Atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan beserta indikator Tujuan/Sasaran disajikan dalam Tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2 Keterkaitan Tujuan dan sasaran

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) (2024)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2030)
					Tahun I (2025)	Tahun II (2026)	Tahun III (2027)	Tahun IV (2028)	Tahun V (2029)	
Visi : Labuhanbatu Selatan yang Semakin Modern										
Misi 3 : Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Tata Kelola Pemerintahannya Memberikan Pelayanan Prima, dan Memiliki Birokrasi yang Bersih, Lincih, serta Responsif										
Tujuan : RPJMD Mewujudkan tata kelola kelembagaan, pelayanan publik yang prima, dan memiliki birokrasi yang bersih, lincih, serta responsif										
Sasaran : 8 RPJMD Meningkatnya Kapasitas Keuangan Daerah										
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan, dan akuntabel		Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya tata kelola keuangan dan aset daerah yang akuntabel	penetapan APBD	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
		Persentase silpa terhadap APBD	%	6.71	6.62	6.53	6.44	6.35	5.90	5.45

3.3 Strategi

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah dengan efektif dan efisien. Strategi adalah langkah-langkah atau cara dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan arah kebijakan adalah merupakan aturan hukum kaidah-kaidah, norma yang menjamin agar pencapaian tujuan dan sasaran tercapai dengan baik.

Strategi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029 ini telah didahului oleh analisis yang cermat atas kondisi makro ekonomi yang ada di daerah dan nasional serta kondisi mikro di daerah. Sebelum masuk pada strategi pembangunan, telah

diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Utara. Dengan menggunakan analisis SWOT, akhirnya ditetapkan Strategi dan Arah Kebijakan untuk mencapai setiap tujuan dan sasaran pembangunan lengkap dengan indikator kinerja tujuan dan sasaran sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Strategi dan Arah Kebijakan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah sebagaimana terdapat dalam tabel 3.3 sebagaimana berikut ini.

Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan periode 2025-2029

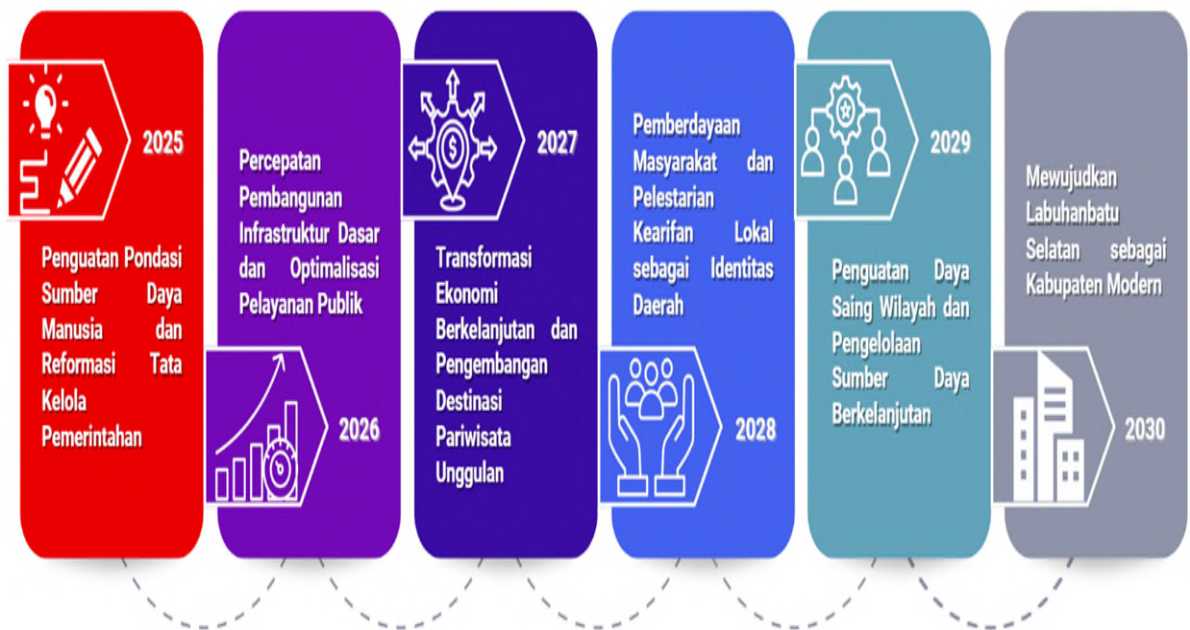
Strategi yang akan dilaksanakan adalah mengoptimalkan segala kekuatan internal serta penguatan kelembagaan dan kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas sebagai pengelola keuangan dan aset daerah. Kemudian akan meminimalisir faktor kelemahan internal seperti keterbatasan personil, keterbatasan sumber daya manusia, masih terbatasnya pemahaman aparatur terhadap makna pelayanan publik, masih terbatasnya akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam gambaran tersebut disusun strategi yang akan dilaksanakan terdiri dari :

1. Perencanaan dan penganggaran belanja daerah dan pelaporan keuangan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
2. Peningkatan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan pemenuhan SDM yang handal.
3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
4. Melaksanakan peningkatan pembinaan mengenai pengelolaan aset daerah.
5. Verifikasi, klasifikasi dan penilaian, monitoring dan investigasi aset daerah.

3.4 Arah Kebijakan

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan, maka dapat disimpulkan tema atau fokus pembangunan. Tema dan prioritas Daerah pembangunan akan memberi arah yang jelas bagi pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan di RPJMD setiap tahun. Penetapan tema tahunan pada RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan arahan yang mengacu dari tema pembangunan tahap kedua pada RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan tema dan prioritas daerah dijadikan acuan skenario tahunan pada RKPD, maka tema pembangunan Tahun 2025-2029 disajikan pada Gambar 3.1 berikut ini.



Gambar 3.1 Tahapan Pembangunan Tahunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Dalam pencapaian tujuan keberhasilan organisasi dirumuskan dalam kebijakan yang menuntun bagaimana program dan kegiatan organisasi harus dilaksanakan. Untuk menentukan kebijakan agar berhasil dengan baik harus memperhatikan faktor penentu keberhasilan dan kegagalan. Arahan dan kebijakan yang dirumuskan dalam menentukan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan Peraturan Daerah/Bupati tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Penerapan penyusunan penganggaran serta penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai jadwal dan standar Akuntansi Pemerintah.
3. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan prima;
4. Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan OPD yang transparan dan bertanggungjawab yang tersaji dalam suatu proses manajemen;
5. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi di bidang pengelolaan keuangan daerah.
6. Pengembangan Kualitas, kapasitas, kompetensi dan peningkatan integritas dan nilai etika aparatur
7. Penerapan penyusunan penganggaran sesuai dengan dokumen perencanaan, analisa standar belanja dan standar satuan harga.
8. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah
9. Monitoring dan Verifikasi data mutasi Barang Milik Daerah
10. Evaluasi Penyusunan dan Rencan Kebutuhan Barang Milik Daerah

**Tabel 3.4 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Visi : Labuhanbatu Selatan yang Semakin Modern			
Misi 3 : RPJMD Mewujudkan penguatan tata kelola kelembagaan, pelayanan publik yang prima, dan memiliki birokrasi yang bersih, lincah, serta responsif			
Tujuan 3 RPJMD : Mewujudkan penguatan tata kelola kelembagaan, pelayanan publik yang prima, dan memiliki birokrasi yang bersih, lincah, serta responsif			
Sasaran 8 RPJMD : Meningkatnya Kapasitas Keuangan Daerah			
1. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan, dan akuntabel	1. Meningkatnya tata kelola keuangan dan aset daerah yang akuntabel	1. Perencanaan dan penganggaran belanja daerah dan pelaporan keuangan disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku	1. Menciptakan Peraturan Daerah/Bupati tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
			2. Penerapan penyusunan penganggaran serta penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai jadwal dan standar Akuntansi Pemerintah.
		2. Peningkatan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan pemenuhan SDM yang handal.	1. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam menunjang <u>pelayanan prima</u>
			2. Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan OPD yang transparan dan bertanggung jawab yang tersaji dalam suatu proses manajemen
		3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan daerah.	1. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi di bidang pengelolaan keuangan daerah.
			2. Pengembangan Kualitas, kapasitas, kompetensi dan peningkatan integritas dan nilai etika aparatur
	4. Melaksanakan peningkatan pembinaan mengenai pengelolaan aset daerah	1. Penerapan penyusunan penganggaran sesuai dengan dokumen perencanaan, analisa standar belanja dan standar satuan harga.	
		2. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah	
	5. Verifikasi, klasifikasi dan penilaian, monitoring dan investigasi aset daerah	1. Monitoring dan Verifikasi data mutasi BMD	
		2. Evaluasi Penyusunan dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Program-Program Unggulan

Langkah selanjutnya adalah menyelaraskan janji politik dengan program prioritas serta menyinkronkan program pembangunan daerah. Tahap ini krusial dalam perumusan RPJMD karena menghasilkan rencana pembangunan konkret dalam bentuk program prioritas. Perumusan program prioritas mencerminkan tujuan strategis Kepala Daerah terpilih dan berhubungan langsung dengan janji kampanye Bupati. Janji-janji tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam strategi, kebijakan, program, atau kegiatan sesuai nomenklatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024. Jika janji bersifat mikro pada level output, maka menjadi kegiatan; jika lebih makro pada level outcome, maka menjadi program prioritas; dan jika berskala lebih luas, diterjemahkan ke dalam strategi.

Penentuan program prioritas juga memperhatikan poin-poin penting janji politik kepala daerah terpilih. Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029 menerjemahkan Visi dan Misinya melalui program dan janji politisnya sebagai berikut:

1. Pemberian Beasiswa Kepada Pelajar yang tidak mampu dan Berprestasi
2. Menciptakan Generasi Agamis Sesuai agama dan ajaran masing masing
3. Pemberian uang Pembinaan terhadap Guru Mengaji, Guru Ibadah, Guru Seniman dan sejenisnya
4. Pembangunan Tempat Pariwisata (Mall, Wisata Air dan sebagainya)
5. Perbaikan Website Informasi Publik
6. Gebrakan Layanan Umum (Terciptanya Layanan Rumah Sakit Umum yaitu RSUD, Disdukcapil dan BPJS dalam hal: Kemudahan Pengadministrasian BPJS; Pembuatan KK dan Akta terhadap Pasien yang melahirkan keluar dari rumah sakit)
7. Pembangunan, Perbaikan, dan Perawatan Jalan Desa, Kecamatan dan Kabupaten Labusel Terang (Pemerataan lampu Jalan)
8. Pembentukan Kader Peduli Paret (Tim Pembasmi Banjir)
9. Pembangunan Ruang Publik Terbuka Hijau
10. Pemberdayaan dan Pembinaan Kegiatan Suku Suku
11. Pemberdayaan Sejarah dan Budaya (Bekerja sama dengan sejarawan dan Para Adat agar Budaya Labusel tidak Punah)

Program adalah instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan dilaksanakan oleh organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan serta penyediaan alokasi anggaran. Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk periode 2025-2029, adalah sebagai berikut:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
- 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah**
- 3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Berdasarkan program di atas, selanjutnya ditetapkan sejumlah Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi melalui perwujudan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional.

Dengan ditetapkannya tujuan, strategi dan kebijakan, maka untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan misi, disusunlah program yang dilaksanakan melalui kegiatan dan Sub Kegiatan dengan indikator yang telah ditentukan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh program kegiatan dan Sub Kegiatan yang mana indikator mengarah kepada Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adapun kegiatannya yakni sebagai berikut:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator dari Kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Adapun Sub kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD

c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator dari Kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan ini adalah:

- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- c. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator dari Kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan ini adalah:

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

- b. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

e) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Diharapkan dari kegiatan ini dihasilkan indikator yang akan Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- e. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pengadaan Mebel
- d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Adapun Sub kegiatan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Indikator dari kegiatan ini yaitu Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah maka dapat disimpulkan sub kegiatan yang akan dibawakan sebagai berikut:

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

i) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Indikator dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, untuk pelaksanaannya dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
- b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD
- d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD
- e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA – SKPD
- f. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
- g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- h. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- i. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
- j. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
- k. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
- l. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
- m. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

j) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Indikator dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, untuk pelaksanaannya dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah.
- b. Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.
- c. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD.
- d. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
- e. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
- f. Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunaidengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
- g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- h. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
- i. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
- j. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
- k. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

k) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Indikator dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, untuk pelaksanaannya dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
- b. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
- c. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
- d. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA
- e. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
- f. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- g. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
- h. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- i. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
- j. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah daerah
- k. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
- l. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
- m. Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah

l) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk pelaksanaannya dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah
- b. Analisis Investasi Pemerintah Daerah
- c. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah
- d. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
- e. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah
- f. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah
- g. Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi
- h. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
- i. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
- j. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
- k. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

m) Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

Indikator dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah, untuk pelaksanaannya dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah
- b. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
- c. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

n) Pengelolaan Barang Milik Daerah

Indikator dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, untuk pelaksanaannya dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan Standar Harga
- b. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
- c. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- d. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- e. Penatausahaan Barang Milik Daerah
- f. Inventarisasi Barang Milik Daerah
- g. Pengamanan Barang Milik Daerah
- h. Penilaian Barang Milik daerah
- i. Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah
- j. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- k. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- l. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- m. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Program dalam Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan program prioritas dari turunan di RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025–2029 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per OPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk pihak yang menerima manfaat tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam hal Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, guna mencapai sasaran tertentu. Program diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Program serta kegiatan-kegiatan prioritas Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif BKAD Tahun 2025-2029
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/ INDIKATOR/ OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN																
KEUANGAN				159.193.363.453,00		158.211.353.151,00		181.185.965.247,00		199.304.561.769,00		219.235.017.941,00		241.158.519.728,00		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE TERPENUHINYA PELAYANAN ADMINISTRASI DAN SARANA PRASARANA PERKANTORAN	0	100%	6.901.807.528,00	100%	13.296.712.198,00	100%	20.635.665.496,00	100%	22.699.232.046,00	100%	24.969.155.247,00	100%	27.466.070.768,00	BKAD	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			15.754.679,00		32.807.830,00		71.076.250,00		78.183.876,00		86.002.262,00		94.602.488,00	BKAD	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3.853.514,00	3 Dokumen	5.222.854,00	3 Dokumen	5.745.139,00	3 Dokumen	6.319.653,00	3 Dokumen	6.951.618,00	3 Dokumen	7.646.780,00	BKAD	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.719.787,00	1 Dokumen	6.402.919,00	1 Dokumen	7.043.211,00	1 Dokumen	7.747.532,00	1 Dokumen	8.522.285,00	1 Dokumen	9.374.513,00	BKAD	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/ INDIKATOR/ OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.826.585,00	1 Dokumen	6.472.596,00	1 Dokumen	7.119.856,00	1 Dokumen	7.831.842,00	1 Dokumen	8.615.026,00	1 Dokumen	9.476.529,00	BKAD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.657.458,00	1 Dokumen	6.295.938,00	1 Dokumen	6.925.532,00	1 Dokumen	7.618.085,00	1 Dokumen	8.379.893,00	1 Dokumen	9.217.882,00	BKAD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.613.050,00	1 Dokumen	6.320.926,00	1 Dokumen	6.953.019,00	1 Dokumen	7.648.321,00	1 Dokumen	8.413.153,00	1 Dokumen	9.254.468,00	BKAD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.084.285,00	1 Laporan	2.092.597,00	1 Laporan	2.301.857,00	1 Laporan	2.532.043,00	1 Laporan	2.785.247,00	1 Laporan	3.063.772,00	BKAD

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/ INDIKATOR/ OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1 Laporan	34.987.636,00	1 Laporan	38.486.400,00	1 Laporan	42.335.040,00	1 Laporan	46.568.544,00	BKAD
Administrasi Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.871.047.934,00		10.876.500.393,00		16.558.771.672,00		18.214.648.838,00		20.036.113.722,00		22.039.725.092,00	BKAD
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/Bulan	21 Orang/Bulan	4.664.294.869,00	21 Orang/Bulan	10.531.741.792,00	24 Orang/Bulan	15.984.915.971,00	24 Orang/Bulan	17.583.407.568,00	24 Orang/Bulan	19.341.748.325,00	24 Orang/Bulan	21.275.923.157,00	BKAD
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	52.063.034,00	1 Dokumen	51.375.833,00	1 Dokumen	56.513.416,00	1 Dokumen	62.164.758,00	1 Dokumen	68.381.234,00	1 Dokumen	75.219.357,00	BKAD
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	154.690.031,00	1 Dokumen	293.382.768,00	1 Dokumen	322.721.045,00	1 Dokumen	354.993.149,00	1 Dokumen	390.492.464,00	1 Dokumen	429.541.710,00	BKAD
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						1 Dokumen	45.839.474,00	1 Dokumen	50.423.421,00	1 Dokumen	55.465.763,00	1 Dokumen	61.012.339,00	BKAD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1 Laporan	83.344.383,00	1 Laporan	91.678.821,00	1 Laporan	100.846.703,00	1 Laporan	110.931.373,00	BKAD

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/ INDIKATOR/ OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						18 Laporan	65.437.383,00	18 Laporan	71.981.121,00	18 Laporan	79.179.233,00	18 Laporan	87.097.156,00	BKAD
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			0		0		210.786.039,00		231.864.642,00		255.051.106,00		280.556.216,00	BKAD
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						1 Dokumen	45.839.374,00	1 Dokumen	50.423.311,00	1 Dokumen	55.465.642,00	1 Dokumen	61.012.206,00	BKAD
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						1 Dokumen	76.983.343,00	1 Dokumen	84.681.677,00	1 Dokumen	93.149.845,00	1 Dokumen	102.464.829,00	BKAD
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						1 Laporan	87.963.322,00	1 Laporan	96.759.654,00	1 Laporan	106.435.619,00	1 Laporan	117.079.181,00	BKAD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			161.112.094,00		365.236.945,00		401.760.639,00		441.936.703,00		486.130.373,00		534.743.410,00	BKAD

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/ INDIKATOR/ OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	5 Paket	102.465.494,00	5 Paket	132.206.402,00	5 Paket	145.427.042,00	5 Paket	159.969.746,00	5 Paket	175.966.721,00	5 Paket	193.563.393,00	BKAD
Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan				33 Orang	148.789.143,00	33 Orang	163.668.057,00	33 Orang	180.034.863,00	33 Orang	198.038.349,00	33 Orang	217.842.184,00	BKAD
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang	58.646.600,00	10 Orang	84.241.400,00	10 Orang	92.665.540,00	10 Orang	101.932.094,00	10 Orang	112.125.303,00	10 Orang	123.337.833,00	BKAD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			464.630.902,00		590.300.003,00		714.742.880,00		786.217.168,00		864.838.884,00		951.322.773,00	BKAD
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	26.118.850,00	1 Paket	13.850.606,00	1 Paket	15.235.667,00	1 Paket	16.759.234,00	1 Paket	18.435.157,00	1 Paket	20.278.673,00	BKAD
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						2 Paket	30.425.642,00	2 Paket	33.468.206,00	2 Paket	36.815.027,00	2 Paket	40.496.530,00	BKAD
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	11.058.340,00	1 Paket	15.153.701,00	1 Paket	16.669.071,00	1 Paket	18.335.978,00	1 Paket	20.169.576,00	1 Paket	22.186.534,00	BKAD
Penyediaan Barang Cetak dan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	1 Paket	1 Paket	48.854.617,00	1 Paket	32.057.160,00	1 Paket	35.262.876,00	1 Paket	38.789.164,00	1 Paket	42.668.080,00	1 Paket	46.934.888,00	BKAD

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/ INDIKATOR/ OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan															
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	30.415.695,00	1 Laporan	25.401.756,00	1 Laporan	27.941.932,00	1 Laporan	30.736.125,00	1 Laporan	33.809.737,00	1 Laporan	37.190.711,00	BKAD	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33 Laporan	33 Laporan	348.183.400,00	33 Laporan	503.836.780,00	33 Laporan	554.220.458,00	33 Laporan	609.642.504,00	33 Laporan	670.606.754,00	33 Laporan	737.667.429,00	BKAD	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1 Dokumen	34.987.234,00	1 Dokumen	38.485.957,00	1 Dokumen	42.334.553,00	1 Dokumen	46.568.008,00	BKAD	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			21.114.111,00		159.097.955,00		1.205.400.887,00		1.325.940.976,00		1.458.535.073,00		1.604.388.580,00	BKAD	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan						1 Unit	534.736.380,00	1 Unit	588.210.018,00	1 Unit	647.031.020,00	1 Unit	711.734.122,00	BKAD	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan						1 Unit	355.674.830,00	1 Unit	391.242.313,00	1 Unit	430.366.544,00	1 Unit	473.403.198,00	BKAD	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				13 Unit	53.498.630,00	13 Unit	58.848.493,00	13 Unit	64.733.342,00	13 Unit	71.206.676,00	13 Unit	78.327.344,00	BKAD	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/ INDIKATOR/ OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	21.114.111,00	8 Unit	105.599.325,00	8 Unit	116.159.257,00	8 Unit	127.775.183,00	8 Unit	140.552.701,00	8 Unit	154.607.971,00	BKAD
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						1 Unit	84.938.471,00	1 Unit	93.432.318,00	1 Unit	102.775.550,00	1 Unit	113.053.105,00	BKAD
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						2 Unit	55.043.456,00	2 Unit	60.547.802,00	2 Unit	66.602.582,00	2 Unit	73.262.840,00	BKAD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			902.641.571,00		866.649.512,00		958.657.201,00		1.054.522.922,00		1.159.975.214,00		1.275.972.735,00	BKAD
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1 Laporan	5.342.738,00	1 Laporan	5.877.012,00	1 Laporan	6.464.713,00	1 Laporan	7.111.184,00	BKAD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	386.879.652,00	2 Laporan	386.879.652,00	2 Laporan	425.567.617,00	2 Laporan	468.124.379,00	2 Laporan	514.936.817,00	2 Laporan	566.430.499,00	BKAD
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	1 Laporan	60.000.000,00	1 Laporan	66.000.000,00	1 Laporan	72.600.000,00	1 Laporan	79.860.000,00	1 Laporan	87.846.000,00	BKAD

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/ INDIKATOR/ OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan	15 Laporan	455.761.919,00	15 Laporan	419.769.860,00	15 Laporan	461.746.846,00	15 Laporan	507.921.531,00	15 Laporan	558.713.684,00	15 Laporan	614.585.052,00	BKAD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			465.506.237,00		406.119.560,00		514.469.928,00		565.916.921,00		622.508.613,00		684.759.474,00	BKAD
Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	38.420.000,00	1 Unit	38.420.000,00	1 Unit	42.262.000,00	1 Unit	46.488.200,00	1 Unit	51.137.020,00	1 Unit	56.250.722,00	BKAD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	14 Unit	271.076.237,00	14 Unit	278.999.560,00	14 Unit	306.899.516,00	14 Unit	337.589.468,00	14 Unit	371.348.415,00	14 Unit	408.483.256,00	BKAD
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	23 Unit	64.510.000,00	23 Unit	31.400.000,00	23 Unit	34.540.000,00	23 Unit	37.994.000,00	23 Unit	41.793.400,00	23 Unit	45.972.740,00	BKAD

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/ INDIKATOR/ OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	91.500.000,00	2 Unit	57.300.000,00	2 Unit	63.030.000,00	2 Unit	69.333.000,00	2 Unit	76.266.300,00	2 Unit	83.892.930,00	BKAD
Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi						2 Unit	67.738.412,00	2 Unit	74.512.253,00	2 Unit	81.963.478,00	2 Unit	90.159.826,00	BKAD
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	31,18	36,02		33		33		33		33		33		
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	26,92	27,60		27,90		28		29		30		31		BKAD
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	91,97	92	151.349.194.244,00	93	143.060.624.265,00	94	158.359.052.077,00	95	174.194.957.282,00	96	191.614.453.008,00	97	210.775.898.308,00	
	Persentase Penurunan SILPA	0	1,38		1,42		1,40		1,42		7		8		
	Persentase laporan keuangan tepat waktu	100	100		100		100		100		100		100		
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan			1.315.287.233,00		1.641.742.693,00		1.805.916.961,00		1.986.508.656,00		2.185.159.521,00		2.403.675.473,00	BKAD

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/ INDIKATOR/ OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Daerah	Rencana Anggaran Daerah														
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	17.748.125,00	2 Dokumen	18.524.892,00	2 Dokumen	20.377.381,00	2 Dokumen	22.415.119,00	2 Dokumen	24.656.631,00	2 Dokumen	27.122.294,00	BKAD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	17.864.222,00	2 Dokumen	18.929.092,00	2 Dokumen	20.822.001,00	2 Dokumen	22.904.201,00	2 Dokumen	25.194.621,00	2 Dokumen	27.714.083,00	BKAD
Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	33 Dokumen	33 Dokumen	17.555.389,00	33 Dokumen	9.675.100,00	33 Dokumen	10.642.610,00	33 Dokumen	11.706.871,00	33 Dokumen	12.877.558,00	33 Dokumen	14.165.314,00	BKAD
Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	33 Dokumen	33 Dokumen	17.615.244,00	33 Dokumen	9.446.340,00	33 Dokumen	10.390.974,00	33 Dokumen	11.430.071,00	33 Dokumen	12.573.078,00	33 Dokumen	13.830.386,00	BKAD
Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA - SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	33 Dokumen	33 Dokumen	17.555.395,00	33 Dokumen	8.637.079,00	33 Dokumen	9.500.787,00	33 Dokumen	10.450.866,00	33 Dokumen	11.495.953,00	33 Dokumen	12.645.548,00	BKAD
Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	33 Dokumen	33 Dokumen	17.615.503,00	33 Dokumen	8.655.561,00	33 Dokumen	9.521.117,00	33 Dokumen	10.473.229,00	33 Dokumen	11.520.552,00	33 Dokumen	12.672.607,00	BKAD
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	496.390.446,00	2 Dokumen	276.342.441,00	2 Dokumen	303.976.685,00	2 Dokumen	334.374.353,00	2 Dokumen	367.811.788,00	2 Dokumen	404.592.967,00	BKAD

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/ INDIKATOR/ OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	438.232.268,00	2 Dokumen	282.411.631,00	2 Dokumen	310.652.794,00	2 Dokumen	341.718.073,00	2 Dokumen	375.889.880,00	2 Dokumen	413.478.868,00	BKAD
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	274.710.641,00	1 Dokumen	85.370.571,00	1 Dokumen	93.907.628,00	1 Dokumen	103.298.391,00	1 Dokumen	113.628.230,00	1 Dokumen	124.991.053,00	BKAD
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				1 Dokumen	9.704.394,00	1 Dokumen	10.674.833,00	1 Dokumen	11.742.316,00	1 Dokumen	12.916.548,00	1 Dokumen	14.208.203,00	BKAD
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				1 Dokumen	547.727.438,00	1 Dokumen	602.500.182,00	1 Dokumen	662.750.200,00	1 Dokumen	729.025.220,00	1 Dokumen	801.927.742,00	BKAD
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				1 Dokumen	9.633.563,00	1 Dokumen	10.596.919,00	1 Dokumen	11.656.611,00	1 Dokumen	12.822.272,00	1 Dokumen	14.104.499,00	BKAD
Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				120 Orang	356.684.591,00	120 Orang	392.353.050,00	120 Orang	431.588.355,00	120 Orang	474.747.190,00	120 Orang	522.221.909,00	BKAD
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan			250.682.657,00		757.918.273,00		2.060.424.810,00		2.266.467.291,00		2.493.114.019,00		2.742.425.421,00	BKAD

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/ INDIKATOR/ OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Daerah	Pengelolaan Perbendaharaan Daerah															
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	66.290.836,00	1 Dokumen	76.733.325,00	1 Dokumen	84.406.657,00	1 Dokumen	92.847.323,00	1 Dokumen	102.132.055,00	1 Dokumen	112.345.260,00	BKAD	
Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						1 Laporan	698.645.228,00	1 Laporan	768.509.751,00	1 Laporan	845.360.726,00	1 Laporan	929.896.799,00	BKAD	
Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 Dokumen	1 Dokumen	12.168.890,00	33 Dokumen	29.293.952,00	33 Dokumen	32.223.347,00	33 Dokumen	35.445.682,00	33 Dokumen	38.990.250,00	33 Dokumen	42.889.275,00	BKAD	
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah						1 Laporan	40.287.163,00	1 Laporan	44.315.879,00	1 Laporan	48.747.467,00	1 Laporan	53.622.214,00	BKAD	
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya						1 Laporan	189.365.338,00	1 Laporan	208.301.872,00	1 Laporan	229.132.059,00	1 Laporan	252.045.265,00	BKAD	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/ INDIKATOR/ OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	1 Dokumen	38.685.413,00	1 Dokumen	55.505.443,00	1 Dokumen	61.055.987,00	1 Dokumen	67.161.586,00	1 Dokumen	73.877.745,00	1 Dokumen	81.265.519,00	BKAD

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/ INDIKATOR/ OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1 Laporan	1 Laporan	62.045.761,00	1 Laporan	113.608.765,00	1 Laporan	124.969.641,00	1 Laporan	137.466.605,00	1 Laporan	151.213.265,00	1 Laporan	166.334.591,00	BKAD

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/ INDIKATOR/ OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi as	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas						1 Laporan	298.416.982,00	1 Laporan	328.258.680,00	1 Laporan	361.084.548,00	1 Laporan	397.193.003,00	BKAD
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen	1 Dokumen	9.759.624,00	1 Dokumen	64.079.803,00	1 Dokumen	70.487.783,00	1 Dokumen	77.536.561,00	1 Dokumen	85.290.217,00	1 Dokumen	93.819.239,00	BKAD
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta	1 Dokumen	1 Dokumen	37.161.280,00	1 Dokumen	101.710.149,00	1 Dokumen	111.881.164,00	1 Dokumen	123.069.280,00	1 Dokumen	135.376.208,00	1 Dokumen	148.913.829,00	BKAD

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/ INDIKATOR/ OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan															
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	33 Orang	33 Orang	24.570.853,00	33 Orang	316.986.836,00	33 Orang	348.685.520,00	33 Orang	383.554.072,00	33 Orang	421.909.479,00	33 Orang	464.100.427,00	BKAD	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			888.027.893,00		1.005.420.716,00		1.872.073.169,00		2.059.280.484,00		2.265.208.532,00		2.491.729.386,00	BKAD	
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah						1 Laporan	75.213.298,00	1 Laporan	82.734.628,00	1 Laporan	91.008.091,00	1 Laporan	100.108.900,00	BKAD	
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban						1 Dokumen	76.195.841,00	1 Dokumen	83.815.425,00	1 Dokumen	92.196.967,00	1 Dokumen	101.416.664,00	BKAD	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/ INDIKATOR/ OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	1 Laporan	16.305.071,00	1 Laporan	23.689.989,00	1 Laporan	26.058.988,00	1 Laporan	28.664.887,00	1 Laporan	31.531.376,00	1 Laporan	34.684.514,00	BKAD
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	1 Laporan	200.999.053,00	1 Laporan	230.123.788,00	1 Laporan	253.136.167,00	1 Laporan	278.449.784,00	1 Laporan	306.294.762,00	1 Laporan	336.924.238,00	BKAD
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	351.967.428,00	2 Dokumen	434.620.103,00	2 Dokumen	478.082.113,00	2 Dokumen	525.890.324,00	2 Dokumen	578.479.356,00	2 Dokumen	636.327.292,00	BKAD
Penyusunan Tanggapan/Tindakan	Jumlah DokumenTanggapan/Tindakan						1 Dokumen	102.873.934,00	1 Dokumen	113.161.327,00	1 Dokumen	124.477.460,00	1 Dokumen	136.925.206,00	BKAD

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/ INDIKATOR/ OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD															
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah						1 Dokumen	24.986.284,00	1 Dokumen	27.484.912,00	1 Dokumen	30.233.403,00	1 Dokumen	33.256.743,00	BKAD	
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD						1 Dokumen	77.195.034,00	1 Dokumen	84.914.537,00	1 Dokumen	93.405.991,00	1 Dokumen	102.746.590,00	BKAD	
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	49.696.485,00	1 Dokumen		1 Dokumen	54.666.133,00	1 Dokumen	60.132.746,00	1 Dokumen	66.146.021,00	1 Dokumen	72.760.623,00	BKAD	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/ INDIKATOR/ OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	21.944.109,00	1 Dokumen		1 Dokumen	24.138.520,00	1 Dokumen	26.552.372,00	1 Dokumen	29.207.609,00	1 Dokumen	32.128.370,00	BKAD
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	33 Orang	33 Orang	247.115.747,00	99 Orang	316.986.836,00	99 Orang	348.685.520,00	99 Orang	383.554.072,00	99 Orang	421.909.479,00	99 Orang	464.100.427,00	BKAD
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina						66 Orang	265.943.725,00	66 Orang	292.538.097,00	66 Orang	321.791.907,00	66 Orang	353.971.098,00	BKAD
Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota						1 Dokumen	64.897.612,00	1 Dokumen	71.387.373,00	1 Dokumen	78.526.110,00	1 Dokumen	86.378.721,00	BKAD
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			148.895.196,461,00		139.655.542,583,00		152.398.177,926,00		167.637.995,719,00		184.401.795,291,00		202.841.974,819,00	BKAD
Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah						1 Dokumen	56.108.764,00	1 Dokumen	61.719.640,00	1 Dokumen	67.891.604,00	1 Dokumen	74.680.764,00	BKAD

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/ INDIKATOR/ OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah						1 Dokumen	125.935.610,00	1 Dokumen	138.529.171,00	1 Dokumen	152.382.088,00	1 Dokumen	167.620.297,00	BKAD
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah						1 Dokumen	73.621.912,00	1 Dokumen	80.984.103,00	1 Dokumen	89.082.513,00	1 Dokumen	97.990.764,00	BKAD
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah						1 Dokumen	65.227.891,00	1 Dokumen	71.750.680,00	1 Dokumen	78.925.748,00	1 Dokumen	86.818.323,00	BKAD
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah						1 Dokumen	85.982.212,00	1 Dokumen	94.580.433,00	1 Dokumen	104.038.476,00	1 Dokumen	114.442.324,00	BKAD
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah						1 Dokumen	90.762.772,00	1 Dokumen	99.839.049,00	1 Dokumen	109.822.954,00	1 Dokumen	120.805.249,00	BKAD

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/ INDIKATOR/ OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi						1 Dokumen	63.527.829,00	1 Dokumen	69.880.612,00	1 Dokumen	76.868.673,00	1 Dokumen	84.555.540,00	BKAD
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	123.312.628.100,00	1 Laporan	123.670.653.600,00	1 Laporan	134.253.633.054,00	1 Laporan	147.678.996.361,00	1 Laporan	162.446.895.998,00	1 Laporan	178.691.585.597,00	BKAD
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan	18.327.679.377,00	1 Laporan	7.800.000.000,00	1 Laporan	8.580.000.000,00	1 Laporan	9.438.000.000,00	1 Laporan	10.381.800.000,00	1 Laporan	11.419.980.000,00	BKAD
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	7.254.888.984,00	2 Laporan	8.184.888.983,00	2 Laporan	9.003.377.882,00	2 Laporan	9.903.715.670,00	2 Laporan	10.894.087.237,00	2 Laporan	11.983.495.961,00	BKAD
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			0		0		222.459.211,00		244.705.132,00		269.175.645,00		296.093.209,00	BKAD
Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah						1 Dokumen	89.675.482,00	1 Dokumen	98.643.030,00	1 Dokumen	108.507.333,00	1 Dokumen	119.358.066,00	BKAD

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/ INDIKATOR/ OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah						1 Dokumen	57.000.000,00	1 Dokumen	62.700.000,00	1 Dokumen	68.970.000,00	1 Dokumen	75.867.000,00	BKAD
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						1 Dokumen	75.783.729,00	1 Dokumen	83.362.102,00	1 Dokumen	91.698.312,00	1 Dokumen	100.868.143,00	BKAD
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya tata kelola aset daerah		100%	942.361.681,00	100%	1.854.016.688,00	100%	2.191.247.674,00	100%	2.410.372.441,00	100%	2.651.409.686,00	100%	2.916.550.652,00	BKAD
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah			942.361.681,00		1.854.016.688,00		2.191.247.674,00		2.410.372.441,00		2.651.409.686,00		2.916.550.652,00	BKAD
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	61.408.377,00	1 Dokumen	91.022.920,00	1 Dokumen	100.125.212,00	1 Dokumen	110.137.733,00	1 Dokumen	121.151.506,00	1 Dokumen	133.266.657,00	BKAD
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	16.325.900,00	1 Dokumen	30.315.757,00	1 Dokumen	33.347.333,00	1 Dokumen	36.682.066,00	1 Dokumen	40.350.273,00	1 Dokumen	44.385.300,00	BKAD
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah						1 Dokumen	48.976.437,00	1 Dokumen	53.874.081,00	1 Dokumen	59.261.489,00	1 Dokumen	65.187.638,00	BKAD

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/ INDIKATOR/ OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Daerah																
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	35.006.616,00	1 Dokumen	53.669.536,00	1 Dokumen	59.036.490,00	1 Dokumen	64.940.139,00	1 Dokumen	71.434.153,00	1 Dokumen	78.577.568,00	BKAD	
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah						1 Laporan	102.852.879,00	1 Laporan	113.138.167,00	1 Laporan	124.451.984,00	1 Laporan	136.897.182,00	BKAD	
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	148.016.928,00	1 Laporan	150.259.536,00	1 Laporan	165.285.490,00	1 Laporan	181.814.039,00	1 Laporan	199.995.443,00	1 Laporan	219.994.987,00	BKAD	
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	351.558.233,00	1 Laporan	462.441.509,00	1 Laporan	508.685.660,00	1 Laporan	559.554.226,00	1 Laporan	615.509.649,00	1 Laporan	677.060.614,00	BKAD	
Penilaian Barang Milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	83.961.644,00	1 Laporan	122.285.293,00	1 Laporan	134.513.822,00	1 Laporan	147.965.204,00	1 Laporan	162.761.724,00	1 Laporan	179.037.896,00	BKAD	
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	40.289.173,00	1 Laporan	91.063.247,00	1 Laporan	100.169.572,00	1 Laporan	110.186.529,00	1 Laporan	121.205.182,00	1 Laporan	133.325.700,00	BKAD	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/ INDIKATOR/ OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	118.097.494,00	1 Dokumen	451.194.429,00	1 Dokumen	496.313.872,00	1 Dokumen	545.945.259,00	1 Dokumen	600.539.785,00	1 Dokumen	660.593.763,00	BKAD
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	32.819.031,00	1 Laporan	97.432.443,00	1 Laporan	107.175.687,00	1 Laporan	117.893.256,00	1 Laporan	129.682.582,00	1 Laporan	142.650.840,00	BKAD
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan	23.869.354,00	1 Laporan	42.132.002,00	1 Laporan	46.345.202,00	1 Laporan	50.979.722,00	1 Laporan	56.077.694,00	1 Laporan	61.685.463,00	BKAD
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	33 Orang	33 Orang	31.008.931,00	66 Orang	262.200.016,00	66 Orang	288.420.018,00	66 Orang	317.262.020,00	66 Orang	348.988.222,00	66 Orang	383.887.044,00	BKAD

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.2.1 Indikator Kinerja Utama

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan bertujuan untuk memberikan gambaran pencapaian sasaran strategis sekaligus mendukung dan mengukur keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Rencana Stragis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Adapun keterkaitan indikator kinerja BKAD dengan tujuan dan sasaran yang mengacu pada misi ke 3 dari RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Labuhanbatu Selatan seperti dalam tabel berikut:

Tabel 4.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) (2024)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2030)
					Tahun I -2025	Tahun II -2026	Tahun III -2027	Tahun IV -2028	Tahun V -2029	
Visi : Labuhanbatu Selatan yang Semakin Modern										
Misi 3 : Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Tata Kelola Pemerintahannya Memberikan Pelayanan Prima, dan Memiliki Birokrasi yang Bersih, Lincih, serta Responsif										
Tujuan RPJMD : Mewujudkan Tata Kelola Kelembagaan, Pelayanan Publik Yang Prima, Dan Memiliki Birokrasi Yang Bersih, Lincih, Serta Responsif	1. Menguatnya Birokrasi yang Profesional dan pelayanan publik yang prima, bersih, lincih, serta responsif	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	87,2	89	91	93	95	97	99
		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	52,97	70	73	76	80	83	85
		Indeks SPBE	Nilai	1,93	2,10	2,22	2,34	2,45	2,55	2,65
		Indeks Reformasi Hukum	Nilai	87,98	89,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00
		Indeks Demokrasi Indonesia	Nilai	75,11	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00	83,00
		Indeks Inovasi Daerah	Nilai	18,02	20	23	26	29	32	34
	2. Meningkatkan Kapasitas Keuangan Daerah	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	Nilai	2,91	3,10	3,22	3,34	3,46	3,58	3,70
		Opini Bpk Atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029, diperlukan indikator kinerja utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai pedoman dalam pencapaian kinerja pemerintah, IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) (2024)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2030)
					Tahun I (2025)	Tahun II (2026)	Tahun III (2027)	Tahun IV (2028)	Tahun V (2029)	
Visi : Labuhanbatu Selatan yang Semakin Modern										
Misi 3 : Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Tata Kelola Pemerintahannya Memberikan Pelayanan Prima, dan Memiliki Birokrasi yang Bersih, Lincah, serta Responsif										
Tujuan RPJMD : Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, lincah, dan responsif										
Sasaran 8 RPJMD : Meningkatkan Kapasitas Keuangan Daerah										
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan, dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola keuangan dan aset daerah yang akuntabel	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Penetapan APBD	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
		Persentase silpa terhadap APBD	%	6,71	6,62	6,53	6,44	6,36	5,9	5,45
		Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persentase	100	100	100	100	100	100	100

4.2.2 Indikator Kinerja Daerah

Selain indikator kinerja BKAD Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana dijabarkan diatas, diformulasikan juga Indikator Kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan urusan dan kewenangan daerah. Indikator tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) daerah. Indikator Kinerja Kunci membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Seberapa besar pencapaian IKK tergantung ukuran yang ditentukan. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

sebagaimana kewenangan BKAD dalam urusan fungsi penunjang bidang keuangan dan bidang aset daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.4 Indikator Kinerja Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Kunci
BKAD Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

ASPEK/ UNSUR/ INDIKATOR KINERJA	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) (2024)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun- I -2025	Tahun-II -2026	Tahun-III -2027	Tahun-IV -2028	Tahun-V -2029	
INDIKATOR KINERJA DAERAH : ASPEK DAYA SAING DADERAH								
Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
INDIKATOR KINERJA KUNCI								
Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan Melalui TKD	Persen	31,8	36,02	33	33	33	33	33
Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persen	26,92	27,60	27,90	28	29	30	31
Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persen	91,97	92	93	94	95	96	97
Presentase Penurunan SILPA	Persen	N/A	1,36	1,38	1,40	1,42	7	8
Presentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100
Presentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persen	N/A	10	5	7	9	11	12

BAB V. PENUTUP

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, telah memenuhi kewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2025 - 2029.

Rencana Strategis ini diharapkan menjadi panduan bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun dalam 5 tahun ke depan, dimana diperlukan konsistensi dan proporsional dalam pelaksanaannya. Hal ini juga termasuk dalam upaya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun untuk merealisasikan RPJMD Tahun 2025-2029 secara lebih substansi bagi masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, masing-masing bidang dapat dan perlu menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholder yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengacu pada RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Dalam melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh Aparatur Sipil Negara Kabupaten Labuhanbatu Selatan, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholder sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Sebagai dokumen induk perencanaan, Renstra ini harus dijadikan pedoman untuk menyusun rencana kerja tahunan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan serta rencana-rencana kerja bidang di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Pada periode Tahun 2025-2029, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki kewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029, yaitu : **“Labuhanbatu Selatan yang Semakin Modern”**.

Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan, karena rencana strategis saja tidak cukup. Marilah kita bertindak dengan mengerahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan kegiatan kita sesuai dengan Rencana Strategis yang telah disusun ini. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kabupaten Mojokertokita perlukan agar tindakan yang kita laksanakan berjalan lebih lancar.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya Good Governance.

Kotapinang, Januari 2026

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

**IMRON ROSADI SIREGAR, S.Pd., M.M.
PEMBINA Tk. I (IV/b)
NIP. 19731110 199903 1 004.**

Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan, karena rencana strategis saja tidak cukup. Marilah kita bertindak dengan mengerahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan kegiatan kita sesuai dengan Rencana Strategis yang telah disusun ini. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kabupaten Mojokertokita perlukan agar tindakan yang kita laksanakan berjalan lebih lancar.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya Good Governance.

Kotapinang, Januari 2026

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**



UMRON ROSADI SIREGAR, S.Pd., M.M.
PEMBINA Tk. I (IV/b)
NIP. 19731110 199903 1 004.

**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02 - KEUANGAN					158.211.353.151,00		181.185.965.247,00		199.304.561.769,00		219.235.017.941,00		241.158.519.728,00	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.296.712.198,00		20.635.665.496,00		22.699.232.046,00		24.969.155.247,00		27.466.070.768,00	
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor (%)	100	100	100	13.296.712.198,00	100	20.635.665.496,00	100	22.699.232.046,00	100	24.969.155.247,00	100	27.466.070.768,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					143.060.624.265,00		158.359.052.077,00		174.194.957.282,00		191.614.453.008,00		210.775.898.308,00	
Meningkatnya tata kelola anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan	Persentase Belanja Pegawai dan Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	31.18	36.02	33	143.060.624.265,00	33	158.359.052.077,00	33	174.194.957.282,00	33	191.614.453.008,00	33	210.775.898.308,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	26.92	27.60	27.90		28		29		30		31		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	91.97	92	93		94		95		96		97		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	0	1.36	1.38		1.40		1.42		7		8		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					1.854.016.688,00		2.191.247.674,00		2.410.372.441,00		2.651.409.686,00		2.916.550.652,00	
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	0	10	5	1.854.016.688,00	7	2.191.247.674,00	9	2.410.372.441,00	11	2.651.409.686,00	12	2.916.550.652,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
TOTAL KESELURUHAN					158.211.353.151,00		181.185.965.247,00		199.304.561.769,00		219.235.017.941,00		241.158.519.728,00	

**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	
5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH								
- Meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan, pelayanan publik yang prima, dan memiliki birokrasi yang bersih, lincah, serta responsif	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan, dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola keuangan dan aset daerah yang akuntabel			Opini BPK atas laporan keuangan (Opini)			
					Opini BPK atas laporan keuangan (Opini)			
					Penetapan APBD (Nilai)			
					Persentase silpa terhadap APBD (%)			
					Persentase laporan keuangan tepat waktu			
					Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor (%)	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
					Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran dan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.02.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan dan Pengujian/Verifikasi	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	5.02.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	5.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Kegiatan Adminstrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	5.02.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	5.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Kegiatan Adminstrasi Umum Perandkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5.02.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (1 Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (1 Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (1 Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (1 Unit)	5.02.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	5.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	
			Meningkatnya tata kelola anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan		Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
					Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
					Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
					Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
					Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Perubahan RKA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah RKA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan	
					Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang	5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan	
					Jumlah RKA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01.0003 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	
					Jumlah Perubahan RKA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01.0004 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01.0005 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	
					Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01.0006 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan	
					Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	5.02.02.2.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (Dokumen)	5.02.02.2.01.0010 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.01.0011 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan (Dokumen)	5.02.02.2.01.0012 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah	5.02.02.2.01.0013 - Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah	
				Terlaksanannya Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah,	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	5.02.02.2.02.0003 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas	
					Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	5.02.02.2.02.0004 - Penatausahaan Pembiayaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana	5.02.02.2.02.0005 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank	5.02.02.2.02.0006 - Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank	
					Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah,	5.02.02.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah	5.02.02.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan	5.02.02.2.02.0009 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub	5.02.02.2.02.0010 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	5.02.02.2.02.0011 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Keuangan Daerah	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban APBD	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota (Laporan)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	5.02.02.2.03.0001 - Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-	5.02.02.2.03.0002 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-	
					Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	5.02.02.2.03.0003 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
					Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang	5.02.02.2.03.0004 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5.02.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	
					Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban	5.02.02.2.03.0006 - Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Keuangan Daerah	5.02.02.2.03.0007 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Keuangan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	5.02.02.2.03.0008 - Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban	
					Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah	5.02.02.2.03.0009 - Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan	
					Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.03.0010 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah	5.02.02.2.03.0011 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban	
					Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	5.02.02.2.03.0012 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota (Laporan)	5.02.02.2.03.0013 - Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan	
				Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan	
					Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah (Laporan)	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan	
					Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi (Laporan)	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.04.0001 - Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	5.02.02.2.04.0002 - Analisis Investasi Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	5.02.02.2.04.0003 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga	5.02.02.2.04.0004 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga	
					Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah (Laporan)	5.02.02.2.04.0005 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah (Laporan)	5.02.02.2.04.0006 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali	
					Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi (Laporan)	5.02.02.2.04.0007 - Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	
					Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan	5.02.02.2.04.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	5.02.02.2.04.0010 - Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan	5.02.02.2.05 - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.05 - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	5.02.02.2.05 - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.05.0001 - Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan	5.02.02.2.05.0002 - Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	5.02.02.2.05.0003 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah	
			Meningkatnya tata kelola aset daerah		Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
				Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	5.02.03.2.01.0001 - Penyusunan Standar Harga	
					Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01.0002 - Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01.0003 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01.0004 - Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01.0006 - Inventarisasi Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian	5.02.03.2.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.0009 - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik	5.02.03.2.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik	
					Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.0011 - Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	5.02.03.2.01.0012 - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.03.2.01.0013 - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02 - KEUANGAN				158.211.353.151,00		181.185.965.247,00		199.304.561.769,00		219.235.017.941,00		241.158.519.728,00		
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				13.296.712.198,00		20.635.665.496,00		22.699.232.046,00		24.969.155.247,00		27.466.070.768,00		
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor (%)	100	100	13.296.712.198,00	100	20.635.665.496,00	100	22.699.232.046,00	100	24.969.155.247,00	100	27.466.070.768,00	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				32.807.830,00		71.076.250,00		78.183.876,00		86.002.262,00		94.602.488,00		
Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	32.807.830,00	1	71.076.250,00	1	78.183.876,00	1	86.002.262,00	1	94.602.488,00		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1		1		1		1		1			
	Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	0		1		1		1		1			
5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.222.854,00		5.745.139,00		6.319.653,00		6.951.618,00		7.646.780,00		
Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)				5.222.854,00	3	5.745.139,00	3	6.319.653,00	3	6.951.618,00	3	7.646.780,00		
5.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				6.402.919,00		7.043.211,00		7.747.532,00		8.522.285,00		9.374.513,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	6.402.919,00	1	7.043.211,00	1	7.747.532,00	1	8.522.285,00	1	9.374.513,00		
5.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				6.472.596,00		7.119.856,00		7.831.842,00		8.615.026,00		9.476.529,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	1	1	6.472.596,00	1	7.119.856,00	1	7.831.842,00	1	8.615.026,00	1	9.476.529,00		
5.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				6.295.938,00		6.925.532,00		7.618.085,00		8.379.893,00		9.217.882,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	6.295.938,00	1	6.925.532,00	1	7.618.085,00	1	8.379.893,00	1	9.217.882,00		
5.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				6.320.926,00		6.953.019,00		7.648.321,00		8.413.153,00		9.254.468,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	1	1	6.320.926,00	1	6.953.019,00	1	7.648.321,00	1	8.413.153,00	1	9.254.468,00		
5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar				2.092.597,00		2.301.857,00		2.532.043,00		2.785.247,00		3.063.772,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1	1	2.092.597,00	1	2.301.857,00	1	2.532.043,00	1	2.785.247,00	1	3.063.772,00		
5.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		34.987.636,00		38.486.400,00		42.335.040,00		46.568.544,00		
Tertaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	0	0,00	1	34.987.636,00	1	38.486.400,00	1	42.335.040,00	1	46.568.544,00		
5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.876.500.393,00		16.558.771.672,00		18.214.648.838,00		20.036.113.722,00		22.039.725.092,00		
Tertaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21	24	10.876.500.393,00	24	16.558.771.672,00	24	18.214.648.838,00	24	20.036.113.722,00	24	22.039.725.092,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	0	0		18		18		18		18			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0		1		1		1		1			
5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				10.531.741.792,00		15.984.915.971,00		17.583.407.568,00		19.341.748.325,00		21.275.923.157,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21	24	10.531.741.792,00	24	15.984.915.971,00	24	17.583.407.568,00	24	19.341.748.325,00	24	21.275.923.157,00		
5.02.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				51.375.833,00		56.513.416,00		62.164.758,00		68.381.234,00		75.219.357,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	51.375.833,00	1	56.513.416,00	1	62.164.758,00	1	68.381.234,00	1	75.219.357,00		
5.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan				293.382.768,00		322.721.045,00		354.993.149,00		390.492.464,00		429.541.710,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	1	1	293.382.768,00	1	322.721.045,00	1	354.993.149,00	1	390.492.464,00	1	429.541.710,00		
5.02.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		45.839.474,00		50.423.421,00		55.465.763,00		61.012.339,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	1	45.839.474,00	1	50.423.421,00	1	55.465.763,00	1	61.012.339,00		
5.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		83.344.383,00		91.678.821,00		100.846.703,00		110.931.373,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	0,00	1	83.344.383,00	1	91.678.821,00	1	100.846.703,00	1	110.931.373,00		
5.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/				0,00		65.437.383,00		71.981.121,00		79.179.233,00		87.097.156,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	0	0	0,00	18	65.437.383,00	18	71.981.121,00	18	79.179.233,00	18	87.097.156,00		
5.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0,00		210.786.039,00		231.864.642,00		255.051.106,00		280.556.216,00		
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	1	210.786.039,00	1	231.864.642,00	1	255.051.106,00	1	280.556.216,00		
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
5.02.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah				0,00		45.839.374,00		50.423.311,00		55.465.642,00		61.012.206,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	1	45.839.374,00	1	50.423.311,00	1	55.465.642,00	1	61.012.206,00		
5.02.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		76.983.343,00		84.681.677,00		93.149.845,00		102.464.829,00		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	1	76.983.343,00	1	84.681.677,00	1	93.149.845,00	1	102.464.829,00		
5.02.01.2.03.0003 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		87.963.322,00		96.759.654,00		106.435.619,00		117.079.181,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	0,00	1	87.963.322,00	1	96.759.654,00	1	106.435.619,00	1	117.079.181,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				365.236.945,00		401.760.639,00		441.936.703,00		486.130.373,00		534.743.410,00		
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	10	365.236.945,00	10	401.760.639,00	10	441.936.703,00	10	486.130.373,00	10	534.743.410,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	33		33		33		33					
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5	5		5		5		5					
5.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				132.206.402,00		145.427.042,00		159.969.746,00		175.966.721,00		193.563.393,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5	5	132.206.402,00	5	145.427.042,00	5	159.969.746,00	5	175.966.721,00	5	193.563.393,00		
5.02.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				148.789.143,00		163.668.057,00		180.034.863,00		198.038.349,00		217.842.184,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	33	148.789.143,00	33	163.668.057,00	33	180.034.863,00	33	198.038.349,00	33	217.842.184,00		
5.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				84.241.400,00		92.665.540,00		101.932.094,00		112.125.303,00		123.337.833,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	10	84.241.400,00	10	92.665.540,00	10	101.932.094,00	10	112.125.303,00	10	123.337.833,00		
5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				590.300.003,00		714.742.880,00		786.217.168,00		864.838.884,00		951.322.773,00		
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	590.300.003,00	1	714.742.880,00	1	786.217.168,00	1	864.838.884,00	1	951.322.773,00		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	33	33		33		33		33					
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1	1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0		1		1		1					
5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				13.850.606,00		15.235.667,00		16.759.234,00		18.435.157,00		20.278.673,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1	1	13.850.606,00	1	15.235.667,00	1	16.759.234,00	1	18.435.157,00	1	20.278.673,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	0,00	1	30.425.642,00	1	33.468.206,00	1	36.815.027,00	1	40.496.530,00		
5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	15.153.701,00	1	16.669.071,00	1	18.335.978,00	1	20.169.576,00	1	22.186.534,00		
5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	32.057.160,00	1	35.262.876,00	1	38.789.164,00	1	42.668.080,00	1	46.934.888,00		
5.02.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	25.401.756,00	1	27.941.932,00	1	30.736.125,00	1	33.809.737,00	1	37.190.711,00		
5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	33	33	503.836.780,00	33	554.220.458,00	33	609.642.504,00	33	670.606.754,00	33	737.667.429,00		
5.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0	0,00	1	34.987.234,00	1	38.485.957,00	1	42.334.553,00	1	46.568.008,00		
5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				159.097.955,00		1.205.400.887,00		1.325.940.976,00		1.458.535.073,00		1.604.388.580,00		
5.02.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	159.097.955,00	1	1.205.400.887,00	1	1.325.940.976,00	1	1.458.535.073,00	1	1.604.388.580,00		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	13		13		13		13		13			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0		0,00		1		534.736.380,00		1		588.210.018,00	1
5.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		355.674.830,00		391.242.313,00		430.366.544,00		473.403.198,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	355.674.830,00	1	391.242.313,00	1	430.366.544,00	1	473.403.198,00		
5.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				53.498.630,00		58.848.493,00		64.733.342,00		71.206.676,00		78.327.344,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	13	53.498.630,00	13	58.848.493,00	13	64.733.342,00	13	71.206.676,00	13	78.327.344,00		
5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				105.599.325,00		116.159.257,00		127.775.183,00		140.552.701,00		154.607.971,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	8	105.599.325,00	8	116.159.257,00	8	127.775.183,00	8	140.552.701,00	8	154.607.971,00		
5.02.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		84.938.471,00		93.432.318,00		102.775.550,00		113.053.105,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	84.938.471,00	1	93.432.318,00	1	102.775.550,00	1	113.053.105,00		
5.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		55.043.456,00		60.547.802,00		66.602.582,00		73.262.840,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	0	0	0,00	1	55.043.456,00	1	60.547.802,00	1	66.602.582,00	1	73.262.840,00		
5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				866.649.512,00		958.657.201,00		1.054.522.922,00		1.159.975.214,00		1.275.972.735,00		
Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	0	866.649.512,00	1	958.657.201,00	1	1.054.522.922,00	1	1.159.975.214,00	1	1.275.972.735,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15	15		15		15		15		15			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	2	2		2		2		2		2			
5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		5.342.738,00		5.877.012,00		6.464.713,00		7.111.184,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	0	0,00	1	5.342.738,00	1	5.877.012,00	1	6.464.713,00	1	7.111.184,00		
5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				386.879.652,00		425.567.617,00		468.124.379,00		514.936.817,00		566.430.499,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	2	2	386.879.652,00	2	425.567.617,00	2	468.124.379,00	2	514.936.817,00	2	566.430.499,00		
5.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				60.000.000,00		66.000.000,00		72.600.000,00		79.860.000,00		87.846.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1	1	60.000.000,00	1	66.000.000,00	1	72.600.000,00	1	79.860.000,00	1	87.846.000,00		
5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				419.769.860,00		461.746.846,00		507.921.531,00		558.713.684,00		614.585.052,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15	15	419.769.860,00	15	461.746.846,00	15	507.921.531,00	15	558.713.684,00	15	614.585.052,00		
5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				406.119.560,00		514.469.928,00		565.916.921,00		622.508.613,00		684.759.474,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	406.119.560,00	2	514.469.928,00	2	565.916.921,00	2	622.508.613,00	2	684.759.474,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan sumbu + eratan dan mesin	14	14		14		14		14		14			
	Lainnya yang Dipelihara (Uji)	23	23		23		23		23		23			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0,00	1	67.738.412,00	1	74.512.253,00	1	81.963.478,00	1	90.159.826,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	1	1		1		1		1		1			
5.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak			38.420.000,00		42.262.000,00		46.488.200,00		51.137.020,00		56.250.722,00			
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	1	1	38.420.000,00	1	42.262.000,00	1	46.488.200,00	1	51.137.020,00	1	56.250.722,00		
5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan			278.999.560,00		306.899.516,00		337.589.468,00		371.348.415,00		408.483.256,00			
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	14	14	278.999.560,00	14	306.899.516,00	14	337.589.468,00	14	371.348.415,00	14	408.483.256,00		
5.02.01.2.09.0003 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			31.400.000,00		34.540.000,00		37.994.000,00		41.793.400,00		45.972.740,00			
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	23	23	31.400.000,00	23	34.540.000,00	23	37.994.000,00	23	41.793.400,00	23	45.972.740,00		
5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan			57.300.000,00		63.030.000,00		69.333.000,00		76.266.300,00		83.892.930,00			
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	57.300.000,00	2	63.030.000,00	2	69.333.000,00	2	76.266.300,00	2	83.892.930,00		
5.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0,00		67.738.412,00		74.512.253,00		81.963.478,00		90.159.826,00			
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0,00	1	67.738.412,00	1	74.512.253,00	1	81.963.478,00	1	90.159.826,00		
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			143.060.624.265,00		158.359.052.077,00		174.194.957.282,00		191.614.453.008,00		210.775.898.308,00			
Meningkatnya tata kelola anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	31,18	33	143.060.624.265,00	33	158.359.052.077,00	33	174.194.957.282,00	33	191.614.453.008,00	33	210.775.898.308,00	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	26,92	27,90		28		29		30		31			
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	91,97	93		94		95		96		97			
	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	0	1,38		1,40		1,42		7		8			
	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100		100		100		100		100			
5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				1.641.742.693,00		1.805.916.961,00		1.986.508.656,00		2.185.159.521,00		2.403.675.473,00		
Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	0	1	1.641.742.693,00	1	1.805.916.961,00	1	1.986.508.656,00	1	2.185.159.521,00	1	2.403.675.473,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	0	1		1		1				1			
	Jumlah Dokumen RKA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	33	33		33		33		33		33			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	0	120		120		120		120		120			
	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	33	33		33		33		33		33			
	Jumlah Perubahan RKA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	33	33		33		33		33		33			
	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	33	33		33		33		33		33			
5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS				18.524.892,00		20.377.381,00		22.415.119,00		24.656.631,00		27.122.294,00		
Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen RKA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	2	18.524.892,00	2	20.377.381,00	2	22.415.119,00	2	24.656.631,00	2	27.122.294,00		
5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				18.929.092,00		20.822.001,00		22.904.201,00		25.194.621,00		27.714.083,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	2	18.929.092,00	2	20.822.001,00	2	22.904.201,00	2	25.194.621,00	2	27.714.083,00		
5.02.02.2.01.0003 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD				9.675.100,00		10.642.610,00		11.706.871,00		12.877.558,00		14.165.314,00		
Tertindakannya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	33	33	9.675.100,00	33	10.642.610,00	33	11.706.871,00	33	12.877.558,00	33	14.165.314,00		
5.02.02.2.01.0004 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD				9.446.340,00		10.390.974,00		11.430.071,00		12.573.078,00		13.830.386,00		
Tertindakannya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	33	33	9.446.340,00	33	10.390.974,00	33	11.430.071,00	33	12.573.078,00	33	13.830.386,00		
5.02.02.2.01.0005 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD				8.637.079,00		9.500.787,00		10.450.866,00		11.495.953,00		12.645.548,00		
Tertindakannya Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	33	33	8.637.079,00	33	9.500.787,00	33	10.450.866,00	33	11.495.953,00	33	12.645.548,00		
5.02.02.2.01.0006 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD				8.655.561,00		9.521.117,00		10.473.229,00		11.520.552,00		12.672.607,00		
Tertindakannya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	33	33	8.655.561,00	33	9.521.117,00	33	10.473.229,00	33	11.520.552,00	33	12.672.607,00		
5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah				276.342.441,00		303.976.685,00		334.374.353,00		367.811.788,00		404.592.967,00		
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2	2	276.342.441,00	2	303.976.685,00	2	334.374.353,00	2	367.811.788,00	2	404.592.967,00		
5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran				282.411.631,00		310.652.794,00		341.718.073,00		375.889.880,00		413.478.868,00		
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	2	2	282.411.631,00	2	310.652.794,00	2	341.718.073,00	2	375.889.880,00	2	413.478.868,00		
5.02.02.2.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				85.370.571,00		93.907.628,00		103.298.391,00		113.628.230,00		124.991.053,00		
Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	1	1	85.370.571,00	1	93.907.628,00	1	103.298.391,00	1	113.628.230,00	1	124.991.053,00		
5.02.02.2.01.0010 - Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Pendapatan				9.704.394,00		10.674.833,00		11.742.316,00		12.916.548,00		14.208.203,00		
Tertindakannya Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	0	1	9.704.394,00	1	10.674.833,00	1	11.742.316,00		12.916.548,00	1	14.208.203,00		
5.02.02.2.01.0011 - Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Belanja Daerah				547.727.438,00		602.500.182,00		662.750.200,00		729.025.220,00		801.927.742,00		
Tertindakannya Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	0	1	547.727.438,00	1	602.500.182,00	1	662.750.200,00	1	729.025.220,00	1	801.927.742,00		
5.02.02.2.01.0012 - Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Belanja				9.633.563,00		10.596.919,00		11.656.611,00		12.822.272,00		14.104.499,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	1	33		33		33		33		33			
5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				76.733.325,00		84.406.657,00		92.847.323,00		102.132.055,00		112.345.260,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	1	1	76.733.325,00	1	84.406.657,00	1	92.847.323,00	1	102.132.055,00	1	112.345.260,00		
5.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun				0,00		698.645.228,00		768.509.751,00		845.360.726,00		929.896.799,00		
Terkelolanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	0	0	0,00	1	698.645.228,00	1	768.509.751,00	1	845.360.726,00	1	929.896.799,00		
5.02.02.2.02.0003 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan				29.293.952,00		32.223.347,00		35.445.682,00		38.990.250,00		42.889.275,00		
Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	1	33	29.293.952,00	33	32.223.347,00	33	35.445.682,00	33	38.990.250,00	33	42.889.275,00		
5.02.02.2.02.0004 - Penatausahaan Pembiayaan Daerah				0,00		40.287.163,00		44.315.879,00		48.747.467,00		53.622.214,00		
Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)	0	0	0,00	1	40.287.163,00	1	44.315.879,00	1	48.747.467,00	1	53.622.214,00		
5.02.02.2.02.0005 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana				0,00		189.365.338,00		208.301.872,00		229.132.059,00		252.045.265,00		
Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana	0	0	0,00	1	189.365.338,00	1	208.301.872,00	1	229.132.059,00	1	252.045.265,00		
5.02.02.2.02.0006 - Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga				55.505.443,00		61.055.987,00		67.161.586,00		73.877.745,00		81.265.519,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan	1	1	55.505.443,00	1	61.055.987,00	1	67.161.586,00	1	73.877.745,00	1	81.265.519,00		
5.02.02.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran				113.608.765,00		124.969.641,00		137.466.605,00		151.213.265,00		166.334.591,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan	1	1	113.608.765,00	1	124.969.641,00	1	137.466.605,00	1	151.213.265,00	1	166.334.591,00		
5.02.02.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan				0,00		298.416.982,00		328.258.680,00		361.084.548,00		397.193.003,00		
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Utang Daerah sebagai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan	0	0	0,00	1	298.416.982,00	1	328.258.680,00	1	361.084.548,00	1	397.193.003,00		
5.02.02.2.02.0009 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan				64.079.803,00		70.487.783,00		77.536.561,00		85.290.217,00		93.819.239,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D	1	1	64.079.803,00	1	70.487.783,00	1	77.536.561,00	1	85.290.217,00	1	93.819.239,00		
5.02.02.2.02.0010 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta				101.710.149,00		111.881.164,00		123.069.280,00		135.376.208,00		148.913.829,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	1	1	101.710.149,00	1	111.881.164,00	1	123.069.280,00	1	135.376.208,00	1	148.913.829,00		
5.02.02.2.02.0011 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				316.986.836,00		348.685.520,00		383.554.072,00		421.909.479,00		464.100.427,00		
Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	0	33	316.986.836,00	33	348.685.520,00	33	383.554.072,00	33	421.909.479,00	33	464.100.427,00		
5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				1.005.420.716,00		1.872.073.169,00		2.059.280.484,00		2.265.208.532,00		2.491.729.386,00		
Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Dokumen)	0	0	1.005.420.716,00	1	1.872.073.169,00	1	2.059.280.484,00	1	2.265.208.532,00	1	2.491.729.386,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1	0		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota (Laporan)	0	0		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	33	99		99		99				99			
	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah	1	0		1		1		1		1			
5.02.02.2.03.0001 - Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran				0,00		75.213.298,00		82.734.628,00			91.008.091,00		100.108.900,00	
Tertindakannya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	0	0	0,00	1	75.213.298,00	1	82.734.628,00	1	91.008.091,00	1	100.108.900,00		
5.02.02.2.03.0002 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,				0,00		76.195.841,00		83.815.425,00			92.196.967,00		101.416.664,00	
Tertindakannya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-	0	0	0,00	1	76.195.841,00	1	83.815.425,00	1	92.196.967,00	1	101.416.664,00		
5.02.02.2.03.0003 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				23.689.989,00		26.058.988,00		28.664.887,00			31.531.376,00		34.684.514,00	
Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1	1	23.689.989,00	1	26.058.988,00	1	28.664.887,00	1	31.531.376,00	1	34.684.514,00		
5.02.02.2.03.0004 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan				230.123.788,00		253.136.167,00		278.449.784,00			306.294.762,00		336.924.238,00	
Tertindakannya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1	1	230.123.788,00	1	253.136.167,00	1	278.449.784,00	1	306.294.762,00	1	336.924.238,00		
5.02.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran				434.620.103,00		478.082.113,00		525.890.324,00			578.479.356,00		636.327.292,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	2	2	434.620.103,00	2	478.082.113,00	2	525.890.324,00	2	578.479.356,00	2	636.327.292,00		
5.02.02.2.03.0006 - Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban				0,00		102.873.934,00		113.161.327,00		124.477.460,00		136.925.206,00		
Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	0	0	0,00	1	102.873.934,00	1	113.161.327,00	1	124.477.460,00	1	136.925.206,00		
5.02.02.2.03.0007 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				0,00		24.986.284,00		27.484.912,00		30.233.403,00		33.256.743,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	0	0	0,00	1	24.986.284,00	1	27.484.912,00	1	30.233.403,00	1	33.256.743,00		
5.02.02.2.03.0008 - Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				0,00		77.195.034,00		84.914.537,00		93.405.991,00		102.746.590,00		
Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban	0	0	0,00	1	77.195.034,00	1	84.914.537,00	1	93.405.991,00	1	102.746.590,00		
5.02.02.2.03.0009 - Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi				0,00		54.666.133,00		60.132.746,00		66.146.021,00		72.760.623,00		
Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1	0	0,00	1	54.666.133,00	1	60.132.746,00	1	66.146.021,00	1	72.760.623,00		
5.02.02.2.03.0010 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan				0,00		24.138.520,00		26.552.372,00		29.207.609,00		32.128.370,00		
Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah	1	0	0,00	1	24.138.520,00	1	26.552.372,00	1	29.207.609,00	1	32.128.370,00		
5.02.02.2.03.0011 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				316.986.836,00		348.685.520,00		383.554.072,00		421.909.479,00		464.100.427,00		
Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	33	99	316.986.836,00	99	348.685.520,00	99	383.554.072,00		421.909.479,00	99	464.100.427,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.02.2.03.0012 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota				0,00		265.943.725,00		292.538.097,00		321.791.907,00		353.971.098,00		
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lapangan)	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lapangan)	0	0	0,00	1	265.943.725,00	1	292.538.097,00	1	321.791.907,00	1	353.971.098,00		
5.02.02.2.03.0013 - Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan				0,00		64.897.612,00		71.387.373,00		78.526.110,00		86.378.721,00		
Tersedianya Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota (Laporan)	0	0	0,00	1	64.897.612,00	1	71.387.373,00	1	78.526.110,00	1	86.378.721,00		
5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				139.655.542.583,00		152.398.177.926,00		167.637.995.719,00		184.401.795.291,00		202.841.974.819,00		
Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	0	0	139.655.542.583,00	1	152.398.177.926,00	1	167.637.995.719,00	1	184.401.795.291,00	1	202.841.974.819,00		
	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi (Laporan)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan	1	1		1		1				1			
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah (Laporan)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah (Laporan)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	0	0		1		1		1		1			
5.02.02.2.04.0001 - Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah				0,00		56.108.764,00		61.719.640,00		67.891.604,00		74.680.764,00		
Terkelolanya Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	0	0	0,00	1	56.108.764,00	1	61.719.640,00	1	67.891.604,00	1	74.680.764,00		
5.02.02.2.04.0002 - Analisis Investasi Pemerintah Daerah				0,00		125.935.610,00		138.529.171,00		152.382.088,00		167.620.297,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah (Laporan)	0	0	0,00	1	125.935.610,00	1	138.529.171,00	1	152.382.088,00	1	167.620.297,00		
5.02.02.2.04.0003 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan				0,00		73.621.912,00		80.984.103,00		89.082.513,00		97.990.764,00		
Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah														
Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	0	0	0,00	1	73.621.912,00	1	80.984.103,00	1	89.082.513,00	1	97.990.764,00		
5.02.02.2.04.0004 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan				0,00		65.227.891,00		71.750.680,00		78.925.748,00		86.818.323,00		
Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah														
Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	0	0	0,00	1	65.227.891,00	1	71.750.680,00	1	78.925.748,00	1	86.818.323,00		
5.02.02.2.04.0005 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan				0,00		85.982.212,00		94.580.433,00		104.038.476,00		114.442.324,00		
Pemberian Pinjaman Daerah														
Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah (Laporan)	0	0	0,00	1	85.982.212,00	1	94.580.433,00	1	104.038.476,00	1	114.442.324,00		
5.02.02.2.04.0006 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan				0,00		90.762.772,00		99.839.049,00		109.822.954,00		120.805.249,00		
Penerimaan Kembali Pinjaman														
Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	0	0	0,00	1	90.762.772,00	1	99.839.049,00	1	109.822.954,00	1	120.805.249,00		
5.02.02.2.04.0007 - Penyusunan Kebijakan dan				0,00		63.527.829,00		69.880.612,00		76.868.673,00		84.555.540,00		
Alokasi Subsidi														
Tersusunnya Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi (Laporan)	0	0	0,00	1	63.527.829,00	1	69.880.612,00	1	76.868.673,00	1	84.555.540,00		
5.02.02.2.04.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran				123.670.653.600,00		134.253.633.054,00		147.678.996.361,00		162.446.895.998,00		178.691.585.597,00		
Bantuan Keuangan														
Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan	1	1	123.670.653.600,00	1	134.253.633.054,00	1	147.678.996.361,00		162.446.895.998,00	1	178.691.585.597,00		
5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan				7.800.000.000,00		8.580.000.000,00		9.438.000.000,00		10.381.800.000,00		11.419.980.000,00		
Mendesak														
Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1	1	7.800.000.000,00	1	8.580.000.000,00	1	9.438.000.000,00	1	10.381.800.000,00	1	11.419.980.000,00		
5.02.02.2.04.0010 - Pengelolaan Dana bagi Hasil				8.184.888.983,00		9.003.377.882,00		9.903.715.670,00		10.894.087.237,00		11.983.495.961,00		
Kabupaten/Kota														
Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	1	2	8.184.888.983,00	2	9.003.377.882,00	2	9.903.715.670,00	2	10.894.087.237,00	2	11.983.495.961,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen) Daerah yang Disusun	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1	1		1		1		1		1			
	Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	0	66		66		66		66		66			
	Barang Milik Daerah (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
5.02.03.2.01.0001 - Penyusunan Standar Harga				91.022.920,00		100.125.212,00		110.137.733,00		121.151.506,00		133.266.657,00		
Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	1	1	91.022.920,00	1	100.125.212,00	1	110.137.733,00	1	121.151.506,00	1	133.266.657,00		
5.02.03.2.01.0002 - Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar				30.315.757,00		33.347.333,00		36.682.066,00		40.350.273,00		44.385.300,00		
Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik	1	1	30.315.757,00	1	33.347.333,00	1	36.682.066,00	1	40.350.273,00	1	44.385.300,00		
5.02.03.2.01.0003 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah				0,00		48.976.437,00		53.874.081,00		59.261.489,00		65.187.638,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	0	0	0,00	1	48.976.437,00	1	53.874.081,00	1	59.261.489,00	1	65.187.638,00		
5.02.03.2.01.0004 - Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik				53.669.536,00		59.036.490,00		64.940.139,00		71.434.153,00		78.577.568,00		
Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	1	53.669.536,00	1	59.036.490,00	1	64.940.139,00	1	71.434.153,00	1	78.577.568,00		
5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik				0,00		102.852.879,00		113.138.167,00		124.451.984,00		136.897.182,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	0	0	0,00	1	102.852.879,00	1	113.138.167,00	1	124.451.984,00	1	136.897.182,00		
Inventarisasi Barang Milik Daerah				150.259.536,00		165.285.490,00		181.814.039,00		199.995.443,00		219.994.987,00		
Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	1	1	150.259.536,00	1	165.285.490,00	1	181.814.039,00	1	199.995.443,00	1	219.994.987,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	1	1	462.441.509,00	1	508.685.660,00	1	559.554.226,00	1	615.509.649,00	1	677.060.614,00		
5.02.03.2.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik	1	1	122.285.293,00	1	134.513.822,00	1	147.965.204,00	1	162.761.724,00	1	179.037.896,00		
5.02.03.2.01.0009 - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan	1	1	91.063.247,00	1	100.169.572,00	1	110.186.529,00	1	121.205.182,00	1	133.325.700,00		
5.02.03.2.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penghapusan Barang Milik	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik	1	1	451.194.429,00	1	496.313.872,00	1	545.945.259,00	1	600.539.785,00	1	660.593.763,00		
5.02.03.2.01.0011 - Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang	1	1	97.432.443,00	1	107.175.687,00	1	117.893.256,00	1	129.682.582,00	1	142.650.840,00		
5.02.03.2.01.0012 - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	1	1	42.132.002,00	1	46.345.202,00	1	50.979.722,00	1	56.077.694,00	1	61.685.463,00		
5.02.03.2.01.0013 - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	0	66	262.200.016,00	66	288.420.018,00	66	317.262.020,00	66	348.988.222,00	66	383.887.044,00		

**TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
RANCANGAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH										
I	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Opini BPK atas laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
II	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Penetapan APBD	Nilai	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
2	Persentase Penurunan SILPA	Persentase	-	1,36	1,38	1,40	1,42	7	8	
3	Persentase silpa terhadap APBD	%	6,71	6,62	6,53	6,44	6,35	5,90	5,45	
4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persentase	-	10	5	7	9	11	12	
5	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persentase	26,92	27,60	27,90	28	29	30	31	
6	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Persentase	31,8	36,02	33	33	33	33	33	
7	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	
8	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persentase	91,97	92	93	94	95	96	97	

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02 - KEUANGAN				158.211.353.151,00		181.185.965.247,00		199.304.561.769,00		219.235.017.941,00		241.158.519.728,00		
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				13.296.712.198,00		20.635.665.496,00		22.699.232.046,00		24.969.155.247,00		27.466.070.768,00		
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor (%)	100	100	13.296.712.198,00	100	20.635.665.496,00	100	22.699.232.046,00	100	24.969.155.247,00	100	27.466.070.768,00	5.02.0.00.0.00.02.00 00 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				32.807.830,00		71.076.250,00		78.183.876,00		86.002.262,00		94.602.488,00		
Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	32.807.830,00	1	71.076.250,00	1	78.183.876,00	1	86.002.262,00	1	94.602.488,00		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	0		1		1		1		1			
5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.222.854,00		5.745.139,00		6.319.653,00		6.951.618,00		7.646.780,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	5.222.854,00	3	5.745.139,00	3	6.319.653,00	3	6.951.618,00	3	7.646.780,00		
5.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				6.402.919,00		7.043.211,00		7.747.532,00		8.522.285,00		9.374.513,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	6.402.919,00	1	7.043.211,00	1	7.747.532,00	1	8.522.285,00	1	9.374.513,00		
5.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				6.472.596,00		7.119.856,00		7.831.842,00		8.615.026,00		9.476.529,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	6.472.596,00	1	7.119.856,00	1	7.831.842,00	1	8.615.026,00	1	9.476.529,00		
5.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				6.295.938,00		6.925.532,00		7.618.085,00		8.379.893,00		9.217.882,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	6.295.938,00	1	6.925.532,00	1	7.618.085,00	1	8.379.893,00	1	9.217.882,00		
5.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				6.320.926,00		6.953.019,00		7.648.321,00		8.413.153,00		9.254.468,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	6.320.926,00	1	6.953.019,00	1	7.648.321,00	1	8.413.153,00	1	9.254.468,00		
5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.092.597,00		2.301.857,00		2.532.043,00		2.785.247,00		3.063.772,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	2.092.597,00	1	2.301.857,00	1	2.532.043,00	1	2.785.247,00	1	3.063.772,00		
5.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		34.987.636,00		38.486.400,00		42.335.040,00		46.568.544,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	0	0,00	1	34.987.636,00	1	38.486.400,00	1	42.335.040,00	1	46.568.544,00		
5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.876.500.393,00		16.558.771.672,00		18.214.648.838,00		20.036.113.722,00		22.039.725.092,00		
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	21	24	10.876.500.393,00	24	16.558.771.672,00	24	18.214.648.838,00	24	20.036.113.722,00	24	22.039.725.092,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	0		18		18		18		18			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	0		1		1		1		1			
5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				10.531.741.792,00		15.984.915.971,00		17.583.407.568,00		19.341.748.325,00		21.275.923.157,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	21	24	10.531.741.792,00	24	15.984.915.971,00	24	17.583.407.568,00	24	19.341.748.325,00	24	21.275.923.157,00		
5.02.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				51.375.833,00		56.513.416,00		62.164.758,00		68.381.234,00		75.219.357,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	51.375.833,00	1	56.513.416,00	1	62.164.758,00	1	68.381.234,00	1	75.219.357,00		
5.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				293.382.768,00		322.721.045,00		354.993.149,00		390.492.464,00		429.541.710,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	293.382.768,00	1	322.721.045,00	1	354.993.149,00	1	390.492.464,00	1	429.541.710,00		
5.02.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		45.839.474,00		50.423.421,00		55.465.763,00		61.012.339,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	1	45.839.474,00	1	50.423.421,00	1	55.465.763,00	1	61.012.339,00		
5.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		83.344.383,00		91.678.821,00		100.846.703,00		110.931.373,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	0	0,00	1	83.344.383,00	1	91.678.821,00	1	100.846.703,00	1	110.931.373,00		
5.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0,00		65.437.383,00		71.981.121,00		79.179.233,00		87.097.156,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	0	0,00	18	65.437.383,00	18	71.981.121,00	18	79.179.233,00	18	87.097.156,00		
5.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0,00		210.786.039,00		231.864.642,00		255.051.106,00		280.556.216,00		
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	1	210.786.039,00	1	231.864.642,00	1	255.051.106,00	1	280.556.216,00		
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
5.02.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		45.839.374,00		50.423.311,00		55.465.642,00		61.012.206,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	1	45.839.374,00	1	50.423.311,00	1	55.465.642,00	1	61.012.206,00		
5.02.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		76.983.343,00		84.681.677,00		93.149.845,00		102.464.829,00		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	1	76.983.343,00	1	84.681.677,00	1	93.149.845,00	1	102.464.829,00		
5.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		87.963.322,00		96.759.654,00		106.435.619,00		117.079.181,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	0,00	1	87.963.322,00	1	96.759.654,00	1	106.435.619,00	1	117.079.181,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				365.236.945,00		401.760.639,00		441.936.703,00		486.130.373,00		534.743.410,00		
Terlaksananya Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10	10	365.236.945,00	10	401.760.639,00	10	441.936.703,00	10	486.130.373,00	10	534.743.410,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	33		33		33		33		33			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5	5		5		5		5		5			
5.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				132.206.402,00		145.427.042,00		159.969.746,00		175.966.721,00		193.563.393,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5	5	132.206.402,00	5	145.427.042,00	5	159.969.746,00	5	175.966.721,00	5	193.563.393,00		
5.02.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				148.789.143,00		163.668.057,00		180.034.863,00		198.038.349,00		217.842.184,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	33	148.789.143,00	33	163.668.057,00	33	180.034.863,00	33	198.038.349,00	33	217.842.184,00		
5.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				84.241.400,00		92.665.540,00		101.932.094,00		112.125.303,00		123.337.833,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10	10	84.241.400,00	10	92.665.540,00	10	101.932.094,00	10	112.125.303,00	10	123.337.833,00		
5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				590.300.003,00		714.742.880,00		786.217.168,00		864.838.884,00		951.322.773,00		
Terlaksananya Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	590.300.003,00	1	714.742.880,00	1	786.217.168,00	1	864.838.884,00	1	951.322.773,00		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	33	33		33		33		33		33			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				13.850.606,00		15.235.667,00		16.759.234,00		18.435.157,00		20.278.673,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	13.850.606,00	1	15.235.667,00	1	16.759.234,00	1	18.435.157,00	1	20.278.673,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		30.425.642,00		33.468.206,00		36.815.027,00		40.496.530,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	0,00	1	30.425.642,00	1	33.468.206,00	1	36.815.027,00	1	40.496.530,00		
5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.153.701,00		16.669.071,00		18.335.978,00		20.169.576,00		22.186.534,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	15.153.701,00	1	16.669.071,00	1	18.335.978,00	1	20.169.576,00	1	22.186.534,00		
5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				32.057.160,00		35.262.876,00		38.789.164,00		42.668.080,00		46.934.888,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	32.057.160,00	1	35.262.876,00	1	38.789.164,00	1	42.668.080,00	1	46.934.888,00		
5.02.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				25.401.756,00		27.941.932,00		30.736.125,00		33.809.737,00		37.190.711,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	25.401.756,00	1	27.941.932,00	1	30.736.125,00	1	33.809.737,00	1	37.190.711,00		
5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				503.836.780,00		554.220.458,00		609.642.504,00		670.606.754,00		737.667.429,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	33	33	503.836.780,00	33	554.220.458,00	33	609.642.504,00	33	670.606.754,00	33	737.667.429,00		
5.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0,00		34.987.234,00		38.485.957,00		42.334.553,00		46.568.008,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	1	34.987.234,00	1	38.485.957,00	1	42.334.553,00	1	46.568.008,00		
5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				159.097.955,00		1.205.400.887,00		1.325.940.976,00		1.458.535.073,00		1.604.388.580,00		
Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	159.097.955,00	1	1.205.400.887,00	1	1.325.940.976,00	1	1.458.535.073,00	1	1.604.388.580,00		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	8		8		8		8		8			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	13		13		13		13		13			
5.02.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		534.736.380,00		588.210.018,00		647.031.020,00		711.734.122,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	534.736.380,00	1	588.210.018,00	1	647.031.020,00	1	711.734.122,00		
5.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		355.674.830,00		391.242.313,00		430.366.544,00		473.403.198,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	355.674.830,00	1	391.242.313,00	1	430.366.544,00	1	473.403.198,00		
5.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				53.498.630,00		58.848.493,00		64.733.342,00		71.206.676,00		78.327.344,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	13	53.498.630,00	13	58.848.493,00	13	64.733.342,00	13	71.206.676,00	13	78.327.344,00		
5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				105.599.325,00		116.159.257,00		127.775.183,00		140.552.701,00		154.607.971,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	8	105.599.325,00	8	116.159.257,00	8	127.775.183,00	8	140.552.701,00	8	154.607.971,00		
5.02.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		84.938.471,00		93.432.318,00		102.775.550,00		113.053.105,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	84.938.471,00	1	93.432.318,00	1	102.775.550,00	1	113.053.105,00		
5.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		55.043.456,00		60.547.802,00		66.602.582,00		73.262.840,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	55.043.456,00	1	60.547.802,00	1	66.602.582,00	1	73.262.840,00		
5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				866.649.512,00		958.657.201,00		1.054.522.922,00		1.159.975.214,00		1.275.972.735,00		
Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	0	866.649.512,00	1	958.657.201,00	1	1.054.522.922,00	1	1.159.975.214,00	1	1.275.972.735,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	15	15		15		15		15		15			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		5.342.738,00		5.877.012,00		6.464.713,00		7.111.184,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	0	0,00	1	5.342.738,00	1	5.877.012,00	1	6.464.713,00	1	7.111.184,00		
5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				386.879.652,00		425.567.617,00		468.124.379,00		514.936.817,00		566.430.499,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2	2	386.879.652,00	2	425.567.617,00	2	468.124.379,00	2	514.936.817,00	2	566.430.499,00		
5.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				60.000.000,00		66.000.000,00		72.600.000,00		79.860.000,00		87.846.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	60.000.000,00	1	66.000.000,00	1	72.600.000,00	1	79.860.000,00	1	87.846.000,00		
5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				419.769.860,00		461.746.846,00		507.921.531,00		558.713.684,00		614.585.052,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	15	15	419.769.860,00	15	461.746.846,00	15	507.921.531,00	15	558.713.684,00	15	614.585.052,00		
5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				406.119.560,00		514.469.928,00		565.916.921,00		622.508.613,00		684.759.474,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	406.119.560,00	2	514.469.928,00	2	565.916.921,00	2	622.508.613,00	2	684.759.474,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	14	14		14		14		14		14			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	23	23		23		23		23		23			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
5.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				38.420.000,00		42.262.000,00		46.488.200,00		51.137.020,00		56.250.722,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	38.420.000,00	1	42.262.000,00	1	46.488.200,00	1	51.137.020,00	1	56.250.722,00		
5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				278.999.560,00		306.899.516,00		337.589.468,00		371.348.415,00		408.483.256,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	14	14	278.999.560,00	14	306.899.516,00	14	337.589.468,00	14	371.348.415,00	14	408.483.256,00		
5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				31.400.000,00		34.540.000,00		37.994.000,00		41.793.400,00		45.972.740,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	23	23	31.400.000,00	23	34.540.000,00	23	37.994.000,00	23	41.793.400,00	23	45.972.740,00		
5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				57.300.000,00		63.030.000,00		69.333.000,00		76.266.300,00		83.892.930,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	57.300.000,00	2	63.030.000,00	2	69.333.000,00	2	76.266.300,00	2	83.892.930,00		
5.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		67.738.412,00		74.512.253,00		81.963.478,00		90.159.826,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0,00	1	67.738.412,00	1	74.512.253,00	1	81.963.478,00	1	90.159.826,00		
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				143.060.624.265,00		158.359.052.077,00		174.194.957.282,00		191.614.453.008,00		210.775.898.308,00		
Meningkatnya tata kelola anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	31,18	33	143.060.624.265,00	33	158.359.052.077,00	33	174.194.957.282,00	33	191.614.453.008,00	33	210.775.898.308,00	5.02.0.00.0.00.02.00 00 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	26,92	27,90		28		29		30		31			
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	91,97	93		94		95		96		97			
	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	0	1,38		1,40		1,42		7		8			
	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100		100		100		100		100			
5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				1.641.742.693,00		1.805.916.961,00		1.986.508.656,00		2.185.159.521,00		2.403.675.473,00		
Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen)	0	1	1.641.742.693,00	1	1.805.916.961,00	1	1.986.508.656,00	1	2.185.159.521,00	1	2.403.675.473,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (Dokumen)	0	1		1		1				1			
	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	33	33		33		33		33		33			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	0	120		120		120		120		120			
	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	33	33		33		33		33		33			
	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	33	33		33		33		33		33			
	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	33	33		33		33		33		33			
5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS				18.524.892,00		20.377.381,00		22.415.119,00		24.656.631,00		27.122.294,00		
Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	2	18.524.892,00	2	20.377.381,00	2	22.415.119,00	2	24.656.631,00	2	27.122.294,00		
5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				18.929.092,00		20.822.001,00		22.904.201,00		25.194.621,00		27.714.083,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	2	18.929.092,00	2	20.822.001,00	2	22.904.201,00	2	25.194.621,00	2	27.714.083,00		
5.02.02.2.01.0003 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD				9.675.100,00		10.642.610,00		11.706.871,00		12.877.558,00		14.165.314,00		
Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	33	33	9.675.100,00	33	10.642.610,00	33	11.706.871,00	33	12.877.558,00	33	14.165.314,00		
5.02.02.2.01.0004 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD				9.446.340,00		10.390.974,00		11.430.071,00		12.573.078,00		13.830.386,00		
Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	33	33	9.446.340,00	33	10.390.974,00	33	11.430.071,00	33	12.573.078,00	33	13.830.386,00		
5.02.02.2.01.0005 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD				8.637.079,00		9.500.787,00		10.450.866,00		11.495.953,00		12.645.548,00		
Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	33	33	8.637.079,00	33	9.500.787,00	33	10.450.866,00	33	11.495.953,00	33	12.645.548,00		
5.02.02.2.01.0006 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD				8.655.561,00		9.521.117,00		10.473.229,00		11.520.552,00		12.672.607,00		
Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	33	33	8.655.561,00	33	9.521.117,00	33	10.473.229,00	33	11.520.552,00	33	12.672.607,00		
5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				276.342.441,00		303.976.685,00		334.374.353,00		367.811.788,00		404.592.967,00		
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2	2	276.342.441,00	2	303.976.685,00	2	334.374.353,00	2	367.811.788,00	2	404.592.967,00		
5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				282.411.631,00		310.652.794,00		341.718.073,00		375.889.880,00		413.478.868,00		
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	2	2	282.411.631,00	2	310.652.794,00	2	341.718.073,00	2	375.889.880,00	2	413.478.868,00		
5.02.02.2.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				85.370.571,00		93.907.628,00		103.298.391,00		113.628.230,00		124.991.053,00		
Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	1	1	85.370.571,00	1	93.907.628,00	1	103.298.391,00	1	113.628.230,00	1	124.991.053,00		
5.02.02.2.01.0010 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				9.704.394,00		10.674.833,00		11.742.316,00		12.916.548,00		14.208.203,00		
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (Dokumen)	0	1	9.704.394,00	1	10.674.833,00	1	11.742.316,00		12.916.548,00	1	14.208.203,00		
5.02.02.2.01.0011 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				547.727.438,00		602.500.182,00		662.750.200,00		729.025.220,00		801.927.742,00		
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen)	0	1	547.727.438,00	1	602.500.182,00	1	662.750.200,00	1	729.025.220,00	1	801.927.742,00		
5.02.02.2.01.0012 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				9.633.563,00		10.596.919,00		11.656.611,00		12.822.272,00		14.104.499,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	0	0		1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)	0	0		1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	1	33		33		33		33		33		33	
5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				76.733.325,00		84.406.657,00		92.847.323,00		102.132.055,00		112.345.260,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	1	1	76.733.325,00	1	84.406.657,00	1	92.847.323,00	1	102.132.055,00	1	112.345.260,00		
5.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				0,00		698.645.228,00		768.509.751,00		845.360.726,00		929.896.799,00		
Terkelolanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Laporan)	0	0	0,00	1	698.645.228,00	1	768.509.751,00	1	845.360.726,00	1	929.896.799,00		
5.02.02.2.02.0003 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				29.293.952,00		32.223.347,00		35.445.682,00		38.990.250,00		42.889.275,00		
Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	1	33	29.293.952,00	33	32.223.347,00	33	35.445.682,00	33	38.990.250,00	33	42.889.275,00		
5.02.02.2.02.0004 - Penatausahaan Pembiayaan Daerah				0,00		40.287.163,00		44.315.879,00		48.747.467,00		53.622.214,00		
Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)	0	0	0,00	1	40.287.163,00	1	44.315.879,00	1	48.747.467,00	1	53.622.214,00		
5.02.02.2.02.0005 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				0,00		189.365.338,00		208.301.872,00		229.132.059,00		252.045.265,00		
Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	0	0	0,00	1	189.365.338,00	1	208.301.872,00	1	229.132.059,00	1	252.045.265,00		
5.02.02.2.02.0006 - Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				55.505.443,00		61.055.987,00		67.161.586,00		73.877.745,00		81.265.519,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	1	1	55.505.443,00	1	61.055.987,00	1	67.161.586,00	1	73.877.745,00	1	81.265.519,00		
5.02.02.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				113.608.765,00		124.969.641,00		137.466.605,00		151.213.265,00		166.334.591,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)	1	1	113.608.765,00	1	124.969.641,00	1	137.466.605,00	1	151.213.265,00	1	166.334.591,00		
5.02.02.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				0,00		298.416.982,00		328.258.680,00		361.084.548,00		397.193.003,00		
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)	0	0	0,00	1	298.416.982,00	1	328.258.680,00	1	361.084.548,00	1	397.193.003,00		
5.02.02.2.02.0009 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemetongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				64.079.803,00		70.487.783,00		77.536.561,00		85.290.217,00		93.819.239,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemetongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemetongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	1	1	64.079.803,00	1	70.487.783,00	1	77.536.561,00	1	85.290.217,00	1	93.819.239,00		
5.02.02.2.02.0010 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				101.710.149,00		111.881.164,00		123.069.280,00		135.376.208,00		148.913.829,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	1	1	101.710.149,00	1	111.881.164,00	1	123.069.280,00	1	135.376.208,00	1	148.913.829,00		
5.02.02.2.02.0011 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				316.986.836,00		348.685.520,00		383.554.072,00		421.909.479,00		464.100.427,00		
Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	0	33	316.986.836,00	33	348.685.520,00	33	383.554.072,00	33	421.909.479,00	33	464.100.427,00		
5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				1.005.420.716,00		1.872.073.169,00		2.059.280.484,00		2.265.208.532,00		2.491.729.386,00		
Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	0	0	1.005.420.716,00	1	1.872.073.169,00	1	2.059.280.484,00	1	2.265.208.532,00	1	2.491.729.386,00		
	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	0		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota (Laporan)	0	0		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	33	99		99		99				99				
	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2		2		2		2		2				
	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	0		1		1		1		1				
5.02.02.2.03.0001 - Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				0,00		75.213.298,00		82.734.628,00		91.008.091,00		100.108.900,00			
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	0	0	0,00	1	75.213.298,00	1	82.734.628,00	1	91.008.091,00	1	100.108.900,00			
5.02.02.2.03.0002 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban				0,00		76.195.841,00		83.815.425,00		92.196.967,00		101.416.664,00			
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	0	0	0,00	1	76.195.841,00	1	83.815.425,00	1	92.196.967,00	1	101.416.664,00			
5.02.02.2.03.0003 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				23.689.989,00		26.058.988,00		28.664.887,00		31.531.376,00		34.684.514,00			
Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	1	1	23.689.989,00	1	26.058.988,00	1	28.664.887,00	1	31.531.376,00	1	34.684.514,00			
5.02.02.2.03.0004 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				230.123.788,00		253.136.167,00		278.449.784,00		306.294.762,00		336.924.238,00			
Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	1	1	230.123.788,00	1	253.136.167,00	1	278.449.784,00	1	306.294.762,00	1	336.924.238,00			
5.02.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				434.620.103,00		478.082.113,00		525.890.324,00		578.479.356,00		636.327.292,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2	434.620.103,00	2	478.082.113,00	2	525.890.324,00	2	578.479.356,00	2	636.327.292,00		
5.02.02.2.03.0006 - Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				0,00		102.873.934,00		113.161.327,00		124.477.460,00		136.925.206,00		
Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	0	0	0,00	1	102.873.934,00	1	113.161.327,00	1	124.477.460,00	1	136.925.206,00		
5.02.02.2.03.0007 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				0,00		24.986.284,00		27.484.912,00		30.233.403,00		33.256.743,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	0	0	0,00	1	24.986.284,00	1	27.484.912,00	1	30.233.403,00	1	33.256.743,00		
5.02.02.2.03.0008 - Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				0,00		77.195.034,00		84.914.537,00		93.405.991,00		102.746.590,00		
Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	0	0	0,00	1	77.195.034,00	1	84.914.537,00	1	93.405.991,00	1	102.746.590,00		
5.02.02.2.03.0009 - Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				0,00		54.666.133,00		60.132.746,00		66.146.021,00		72.760.623,00		
Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	0	0,00	1	54.666.133,00	1	60.132.746,00	1	66.146.021,00	1	72.760.623,00		
5.02.02.2.03.0010 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				0,00		24.138.520,00		26.552.372,00		29.207.609,00		32.128.370,00		
Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	0	0,00	1	24.138.520,00	1	26.552.372,00	1	29.207.609,00	1	32.128.370,00		
5.02.02.2.03.0011 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				316.986.836,00		348.685.520,00		383.554.072,00		421.909.479,00		464.100.427,00		
Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	33	99	316.986.836,00	99	348.685.520,00	99	383.554.072,00	99	421.909.479,00	99	464.100.427,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.02.2.03.0012 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota				0,00		265.943.725,00		292.538.097,00		321.791.907,00		353.971.098,00		
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	0	0	0,00	1	265.943.725,00	1	292.538.097,00	1	321.791.907,00	1	353.971.098,00		
5.02.02.2.03.0013 - Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah				0,00		64.897.612,00		71.387.373,00		78.526.110,00		86.378.721,00		
Tersedianya Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota (Laporan)	0	0	0,00	1	64.897.612,00	1	71.387.373,00	1	78.526.110,00	1	86.378.721,00		
5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				139.655.542.583,00		152.398.177.926,00		167.637.995.719,00		184.401.795.291,00		202.841.974.819,00		
Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah (Laporan)	0	0	139.655.542.583,00	1	152.398.177.926,00	1	167.637.995.719,00	1	184.401.795.291,00	1	202.841.974.819,00		
	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi (Laporan)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah (Laporan)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah (Laporan)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
5.02.02.2.04.0001 - Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah				0,00		56.108.764,00		61.719.640,00		67.891.604,00		74.680.764,00		
Terkelolanya Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	0	0	0,00	1	56.108.764,00	1	61.719.640,00	1	67.891.604,00	1	74.680.764,00		
5.02.02.2.04.0002 - Analisis Investasi Pemerintah Daerah				0,00		125.935.610,00		138.529.171,00		152.382.088,00		167.620.297,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah (Laporan)	0	0	0,00	1	125.935.610,00	1	138.529.171,00	1	152.382.088,00	1	167.620.297,00		
5.02.02.2.04.0003 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan				0,00		73.621.912,00		80.984.103,00		89.082.513,00		97.990.764,00		
Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah														
Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	0	0	0,00	1	73.621.912,00	1	80.984.103,00	1	89.082.513,00	1	97.990.764,00		
5.02.02.2.04.0004 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				0,00		65.227.891,00		71.750.680,00		78.925.748,00		86.818.323,00		
Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	0	0	0,00	1	65.227.891,00	1	71.750.680,00	1	78.925.748,00	1	86.818.323,00		
5.02.02.2.04.0005 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah				0,00		85.982.212,00		94.580.433,00		104.038.476,00		114.442.324,00		
Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah (Laporan)	0	0	0,00	1	85.982.212,00	1	94.580.433,00	1	104.038.476,00	1	114.442.324,00		
5.02.02.2.04.0006 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan				0,00		90.762.772,00		99.839.049,00		109.822.954,00		120.805.249,00		
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah														
Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah (Laporan)	0	0	0,00	1	90.762.772,00	1	99.839.049,00	1	109.822.954,00	1	120.805.249,00		
5.02.02.2.04.0007 - Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi				0,00		63.527.829,00		69.880.612,00		76.868.673,00		84.555.540,00		
Tersusunnya Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi (Laporan)	0	0	0,00	1	63.527.829,00	1	69.880.612,00	1	76.868.673,00	1	84.555.540,00		
5.02.02.2.04.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				123.670.653.600,00		134.253.633.054,00		147.678.996.361,00		162.446.895.998,00		178.691.585.597,00		
Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	1	1	123.670.653.600,00	1	134.253.633.054,00	1	147.678.996.361,00	1	162.446.895.998,00	1	178.691.585.597,00		
5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				7.800.000.000,00		8.580.000.000,00		9.438.000.000,00		10.381.800.000,00		11.419.980.000,00		
Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1	1	7.800.000.000,00	1	8.580.000.000,00	1	9.438.000.000,00	1	10.381.800.000,00	1	11.419.980.000,00		
5.02.02.2.04.0010 - Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				8.184.888.983,00		9.003.377.882,00		9.903.715.670,00		10.894.087.237,00		11.983.495.961,00		
Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	1	2	8.184.888.983,00	2	9.003.377.882,00	2	9.903.715.670,00	2	10.894.087.237,00	2	11.983.495.961,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	0	66		66		66		66		66			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
5.02.03.2.01.0001 - Penyusunan Standar Harga				91.022.920,00		100.125.212,00		110.137.733,00		121.151.506,00		133.266.657,00		
Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	1	1	91.022.920,00	1	100.125.212,00	1	110.137.733,00	1	121.151.506,00	1	133.266.657,00		
5.02.03.2.01.0002 - Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				30.315.757,00		33.347.333,00		36.682.066,00		40.350.273,00		44.385.300,00		
Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	1	30.315.757,00	1	33.347.333,00	1	36.682.066,00	1	40.350.273,00	1	44.385.300,00		
5.02.03.2.01.0003 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah				0,00		48.976.437,00		53.874.081,00		59.261.489,00		65.187.638,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	0	0	0,00	1	48.976.437,00	1	53.874.081,00	1	59.261.489,00	1	65.187.638,00		
5.02.03.2.01.0004 - Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				53.669.536,00		59.036.490,00		64.940.139,00		71.434.153,00		78.577.568,00		
Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	1	53.669.536,00	1	59.036.490,00	1	64.940.139,00	1	71.434.153,00	1	78.577.568,00		
5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah				0,00		102.852.879,00		113.138.167,00		124.451.984,00		136.897.182,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	0	0	0,00	1	102.852.879,00	1	113.138.167,00	1	124.451.984,00	1	136.897.182,00		
5.02.03.2.01.0006 - Inventarisasi Barang Milik Daerah				150.259.536,00		165.285.490,00		181.814.039,00		199.995.443,00		219.994.987,00		
Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	1	1	150.259.536,00	1	165.285.490,00	1	181.814.039,00	1	199.995.443,00	1	219.994.987,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah				462.441.509,00		508.685.660,00		559.554.226,00		615.509.649,00		677.060.614,00		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	1	1	462.441.509,00	1	508.685.660,00	1	559.554.226,00	1	615.509.649,00	1	677.060.614,00		
5.02.03.2.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah				122.285.293,00		134.513.822,00		147.965.204,00		162.761.724,00		179.037.896,00		
Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	1	1	122.285.293,00	1	134.513.822,00	1	147.965.204,00	1	162.761.724,00	1	179.037.896,00		
5.02.03.2.01.0009 - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				91.063.247,00		100.169.572,00		110.186.529,00		121.205.182,00		133.325.700,00		
Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	1	1	91.063.247,00	1	100.169.572,00	1	110.186.529,00	1	121.205.182,00	1	133.325.700,00		
5.02.03.2.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				451.194.429,00		496.313.872,00		545.945.259,00		600.539.785,00		660.593.763,00		
Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	1	451.194.429,00	1	496.313.872,00	1	545.945.259,00	1	600.539.785,00	1	660.593.763,00		
5.02.03.2.01.0011 - Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				97.432.443,00		107.175.687,00		117.893.256,00		129.682.582,00		142.650.840,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	1	1	97.432.443,00	1	107.175.687,00	1	117.893.256,00	1	129.682.582,00	1	142.650.840,00		
5.02.03.2.01.0012 - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				42.132.002,00		46.345.202,00		50.979.722,00		56.077.694,00		61.685.463,00		
Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	1	1	42.132.002,00	1	46.345.202,00	1	50.979.722,00	1	56.077.694,00	1	61.685.463,00		
5.02.03.2.01.0013 - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				262.200.016,00		288.420.018,00		317.262.020,00		348.988.222,00		383.887.044,00		
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	0	66	262.200.016,00	66	288.420.018,00	66	317.262.020,00	66	348.988.222,00	66	383.887.044,00		

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM Mendukung PROGRAM PRIORITAS
Pembangunan Daerah Rancangan Akhir RENSTRA Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	Program pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya tata kelola anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
			5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
			5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
			5.02.02.2.01.0003 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
			5.02.02.2.01.0004 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
			5.02.02.2.01.0005 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
			5.02.02.2.01.0006 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
			5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
			5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
			5.02.02.2.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
			5.02.02.2.01.0010 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
			5.02.02.2.01.0011 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
			5.02.02.2.01.0012 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
			5.02.02.2.01.0013 - Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
			5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
			5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
			5.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
			5.02.02.2.02.0003 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
			5.02.02.2.02.0004 - Penatausahaan Pembiayaan Daerah
			5.02.02.2.02.0005 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
			5.02.02.2.02.0006 - Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
			5.02.02.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
			5.02.02.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
			5.02.02.2.02.0009 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait
			5.02.02.2.02.0010 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
			5.02.02.2.02.0011 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
			5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
			5.02.02.2.03.0001 - Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
			5.02.02.2.03.0002 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
			5.02.02.2.03.0003 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
			5.02.02.2.03.0004 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
			5.02.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
			5.02.02.2.03.0006 - Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

			5.02.02.2.03.0007 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
			5.02.02.2.03.0008 - Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
			5.02.02.2.03.0009 - Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
			5.02.02.2.03.0010 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
			5.02.02.2.03.0011 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
			5.02.02.2.03.0012 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
			5.02.02.2.03.0013 - Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah
			5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
			5.02.02.2.04.0001 - Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah
			5.02.02.2.04.0002 - Analisis Investasi Pemerintah Daerah
			5.02.02.2.04.0003 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah
			5.02.02.2.04.0004 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
			5.02.02.2.04.0005 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah
			5.02.02.2.04.0006 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah
			5.02.02.2.04.0007 - Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi
			5.02.02.2.04.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
			5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
			5.02.02.2.04.0010 - Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota
			5.02.02.2.05 - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
			5.02.02.2.05.0003 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya tata kelola aset daerah	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah
			5.02.03.2.01.0001 - Penyusunan Standar Harga
			5.02.03.2.01.0002 - Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
			5.02.03.2.01.0003 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
			5.02.03.2.01.0004 - Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
			5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah
			5.02.03.2.01.0006 - Inventarisasi Barang Milik Daerah
			5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah
			5.02.03.2.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah
			5.02.03.2.01.0009 - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
			5.02.03.2.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemsunahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
			5.02.03.2.01.0011 - Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
			5.02.03.2.01.0012 - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
			5.02.03.2.01.0013 - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

